

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi 1 Juni Tahun 2025 No. 62

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



PKS

*Konferensi Parlemen
Negara-negara OKI*

**Indonesia
Dorong Solusi
Konkret Bagi
Palestina**

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng



Semangat Berkurban Untuk Bangsa

Badah kurban adalah syariat Islam yang diambil dari peristiwa Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih puteranya Nabiullah Ismail sebagaimana terekam dalam Surat ash-Shaffat ayat 99-111. Dikisahkan peristiwa Nabi Ibrahim yang mengurbankan putranya Ismail AS atas perintah Allah SWT.

Ismail sendiri merupakan seorang anak yang ia idam-

idamkan setelah bertahun-tahun istrinya tidak segera memiliki buah hati. Dalam Surat ash-Shaffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa: "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih." Allah SWT kemudian memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS dengan kelahiran seorang anak yang

amat cerdas dan sabar.

Ketika anak itu dewasa, Nabi Ibrahim AS diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, "Wahai anaku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah SWT yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk

orang-orang yang sabar."

Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim AS membawa Nabi Ismail AS ke sebuah tumpukan pasir dan ia membaringkannya dengan posisi pelipis di atas tanah. Akhir kisah, atas kehendak Allah SWT, melihat kesungguhan dan keteguhan hati Nabi Ibrahim, Allah SWT menggantikan putranya Ismail dengan seekor domba untuk disembelih.

Banyak pelajaran penting syariat kurban yang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan musti dipahami dan diteladani oleh seluruh masyarakat khususnya umat Islam.

Pertama, peristiwa tersebut mengajarkan tentang ujian keimanan dan keiklasan seorang hamba untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan dicintainya kepada Sang Kholik Pemilik Cin-

ta yang sesungguhnya. Ini sekaligus ajaran tentang ketahanan keluarga dimana Ibrahim berdialog dengan anaknya ketika perintah itu datang. Sangat indah dialognya sehingga tidak semena-mena memaksakan kehendak kepada anak. Dan ketahanan keluarga adalah pilar ketahanan nasional.

Kedua, perintah berkorban ini adalah manifestasi dari kecerdasan emosional dan spiritual manusia. Kerelaan berbagi itu butuh kecerdasan sekaligus menunjukkan kualitas tertinggi seorang manusia di hadapan Allah dan sesamanya.

Ketiga, masyarakat yang siap berkorban maka siap bela negara. Berkorban secara faktual adalah bentuk kepedulian kepada sesama karena ada daging yang dibagikan. Ini bentuk konkrit wawasan kebangsaan bahwa kita semua memiliki negeri ini, mencintai negeri ini, dengan kesiapan berbagi kepada sesama anak bangsa hingga pelosok-pelosok daerah. Kalau berkorban ternak saja untuk dibagikan kepada warga mereka siap, apalagi berkorban untuk negara dan bangsanya. Ini bagian dari wawasan kebangsaan untuk membela tanah air.

Keempat, berkorban punya multiplier effect secara ekonomi. Pemerintah semestinya tidak perlu impor daging. Belajar dari kurban ada masyarakat yang menyediakan ternak atau menjadi peternak, ada penjual,

bahkan ada yang sekadar dititipi ternak untuk penggemukan. Ini semua bisa menghasilkan bukan hanya ketahanan tapi kedaulatan pangan.

Kelima, kurban mengandung pesan kolaborasi yang kuat. Bangsa besar ini hanya bisa maju dengan semangat kolaborasi dan kerjasama. Tidak mungkin bangsa ini dibangun

hanya satu kelompok, hanya satu partai. Kerjasama adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Keenam, kurban membawa pesan bagi pemimpin. Belajar dari Nabiullah Ibrahim beliau mendahulukan cintanya kepada Allah dari dirinya dan anaknya. Pemimpin harus demikian, dahulukan kepentingan

orang banyak daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Trust akan muncul kepada pemimpin yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, keluarga, bahkan kelompok dan partainya.

Ketujuh, suri teladan itu sangat penting terutama dari

para pemimpin dan elit negeri ini. Di tengah banyak kesulitan rakyat, jangan sampai ada moral hazard, jangan korupsi, jangan menyelewengkan bantuan sosial. Sebaliknya wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kikis egoisme, nafsu pribadi yang berlebihan. Munculkan kejujuran dan transparansi.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
Ketua Fraksi PKS DPR RI



SOSIAL MEDIA
Fraksi PKS DPR RI



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



image istimewa

Ahmad Heryawan: Tangani Judi Online di TNI dengan Pendekatan Komprehensif dan Pembinaan Bertahap

Jakarta (16/05) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya langkah-langkah komprehensif dan bertahap dalam menangani maraknya kasus keterlibatan oknum anggota TNI dalam praktik judi online.

Menurutnya, tindakan pemecatan atau pemidanaan saja tidak cukup, karena permasalahan tersebut berakar dari berbagai faktor mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh.

Dalam wawancara yang disiarkan pada Jumat pagi, Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa penyebab keterlibatan anggota TNI dalam judi online bisa berasal dari tekanan ekonomi, terutama pada prajurit berpangkat rendah yang mengalami kesulitan keuangan. Manajemen keuangan pribadi yang belum optimal, akses mudah terhadap platform judi melalui ponsel, serta minimnya pengawasan digital internal di lingkungan TNI juga turut mempermudah keterlibatan dalam praktik tersebut.

Selain itu, menurut Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan, budaya kolegalitas yang langgar di beberapa satuan serta kurangnya literasi keuangan dan pelatihan pengendalian emosi membuat sejumlah anggota rentan terhadap bujukan untuk berjudi.

Ia juga menyoroti bahwa sebagian prajurit menjadikan aktivitas tersebut sebagai pelarian dari tekanan psikologis akibat tugas dan latihan yang berat, sehingga mereka merasa berjudi menjadi semacam bentuk 'healing'.

Ahmad Heryawan menekankan bahwa pendekatan hukum tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pemecatan, menurutnya, seharusnya menjadi langkah terakhir setelah proses pembinaan dan peringatan dilakukan secara serius.

"Saya tidak setuju langsung pecat. Mereka adalah aset bangsa yang harus kita pelihara dan jaga dengan baik," ujarnya.

Ia mendorong TNI untuk memperkuat program pembinaan mental dan spiritual melalui tim pembinaan mental (bintal) yang telah ada, serta melibatkan tokoh-tokoh agama dan psikologi militer dalam memberikan pendekatan rohani dan edukatif. Edukasi berkala

Ahmad Heryawan: Tangani Judi Online di TNI dengan Pendekatan Komprehensif dan Pembinaan Bertahap

« SEBELUMNYA

tentang bahaya judi online dari sisi ekonomi, sosial, karir, dan psikologis juga dinilai penting agar prajurit benar-benar memahami dampak jangka panjang dari praktik tersebut.

“Penyelesaian harus menyentuh kesadaran terdalam. Seseorang harus sadar bahwa judi itu dosa, tidak menguntungkan secara ekonomi, merusak secara sosial dan psikologis,

serta bisa menghancurkan keluarga,” tambahnya.

Tak hanya aspek pembinaan, peningkatan kesejahteraan prajurit juga menjadi perhatian. Menurut Ahmad Heryawan, gaji yang belum mencukupi bisa mendorong sebagian prajurit mencari jalan pintas, termasuk melalui judi online. Ia berharap perubahan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan bisa menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan prajurit.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi pemantauan juga perlu dioptimalkan. Ia mencontohkan teknologi di ruang-ruang Komunikasi Digital (Komdigi) yang dapat mendeteksi sinyal atau aktivitas mencurigakan di lingkungan kerja, bisa diterapkan untuk mencegah akses terhadap situs atau aplikasi judi online oleh anggota TNI.

Sebagai penutup, Anggota Legislatif asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini menyatakan optimismenya bahwa TNI, sebagai institusi yang jumlah personelnya terbatas, tetap bisa dikawal dan dibina dengan serius agar tetap menjadi penjaga kedaulatan negara yang bukan hanya profesional secara militer, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.



image istimewa



Gaji yang belum mencukupi bisa mendorong sebagian prajurit mencari jalan pintas, termasuk melalui judi online. Ia berharap perubahan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan bisa menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan prajurit.

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Aleg PKS Habib Idrus: Indonesia Perlu Bertindak Cepat Atasi Eskalasi Konflik India-Pakistan

Jakarta (09/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri menanggapi perkembangan terbaru terkait eskalasi konflik antara India dan Pakistan yang memasuki fase berbahaya dengan penggunaan serangan drone.

Anggota Komisi I DPR RI ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan seruan mendesak kepada semua pihak terkait.

"Kami menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas perkembangan terbaru konflik India-Pakistan, khususnya setelah laporan serangan drone India yang menewaskan warga sipil di Miano, Sindh dan melukai empat tentara di dekat Lahore. Ini merupakan eskalasi yang sangat berbahaya dan tidak dapat dibiarkan," tegas Habib.

Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa serangan

terhadap kawasan sipil dan tempat ibadah merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

"Kami mengancam segala bentuk serangan yang mengancam nyawa warga sipil tak bersalah. Laporan bahwa 12 drone berhasil ditembak jatuh oleh pihak Pakistan menunjukkan betapa berbahayanya situasi ini bagi stabilitas regional," terang Habib Idrus.

Mengutip data terbaru, Habib Idrus menyoroti ancaman langsung terhadap Warga Negara Indonesia.

"Kami menerima laporan bahwa serangan terjadi di tujuh kota besar Pakistan termasuk Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, dan Karachi, kota-kota yang diketahui menjadi tempat tinggal puluhan WNI. Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan," ungkapnya.

Legislator asal Banten ini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret.

"Kami meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera mengaktifkan protokol darurat perlindungan WNI. Pendataan WNI di kota-kota terdampak harus dilakukan secepatnya, disertai penyiapan safe house di KBRI Islamabad dan KJRI Karachi sebagai tempat perlindungan sementara," jelasnya.

Di tingkat diplomasi, Habib Idrus menyarankan langkah-langkah strategis.

"Indonesia harus memanfaatkan segala jalur diplomasi yang ada. Kami mendorong agar pemerintah segera menggelar konsultasi tripartit dengan India dan Pakistan, sekaligus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat.

Jalur OKI juga harus dioptimalkan untuk mendorong gencatan senjata segera," ujar Habib Idrus.

Habib Idrus mengharapkan laporan lengkap kaitan dengan evakuasi dan perlindungan WNI segera diberikan oleh Kemenlu.



"Kami menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas perkembangan terbaru konflik India-Pakistan, khususnya setelah laporan serangan drone India yang menewaskan warga sipil di Miano, Sindh dan melukai empat tentara di dekat Lahore. Ini merupakan eskalasi yang sangat berbahaya dan tidak dapat dibiarkan,

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi I DPR RI



Ateng Sutisna Pertanyakan Urgensi dan Evaluasi Serius Terhadap Pemekaran Daerah

Jakarta (13/05) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti usulan terbaru terkait enam daerah istimewa dan lima daerah khusus yang diajukan kepada pemerintah.

Ia mempertanyakan urgensi dari usulan tersebut, sekaligus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau kembali pendekatan pemekaran wilayah yang selama ini dilakukan.

“Pertanyaan mendasarinya: mengapa harus didorong menjadi daerah istimewa atau daerah khusus, bukan melalui mekanisme pemekaran konvensional seperti Daerah Otonomi Baru (DOB)? Apakah betul usulan ini didasarkan atas kebutuhan mendesak atau hanya karena tekanan politik tertentu?” ungkap Ateng.

Menurutnya, jumlah DOB yang mencapai ratusan

merupakan angka terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan adanya ketidakpuasan yang lebih dalam dari masyarakat terhadap kondisi pemerintahan daerah saat ini.

“Apakah Kemendagri tidak melihat bahwa maraknya usulan ini bisa menjadi indikator kegagalan tata kelola daerah yang ada, bukan sekadar memenuhi alasan administratif seperti luas wilayah atau jumlah penduduk?” tambahnya.

Anggota DPR - RI dari Fraksi PKS tersebut juga menyoroti lemahnya evaluasi

pascapemekaran yang dilakukan Kemendagri. Ia mencontohkan beberapa DOB seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Morotai, dan Buton Tengah yang justru mengalami penurunan kapasitas fiskal dan makin tergantung pada pemerintah pusat.

“Kita bisa lihat data yang menunjukkan bahwa PAD mereka hanya menyumbang 1-2 persen dari total APBD, sementara sisanya bergantung pada DAU atau DAK. Bahkan beberapa daerah sempat mengalami krisis keuangan hingga layanan dasar terhenti. Artinya, DOB ini bukanlah menjadi solusi pembangunan, tapi justru beban baru,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi Kemendagri sendiri, sekitar 78 persen DOB yang terbentuk dalam periode 1999-2009 belum mampu mandiri.

Ateng mendesak agar Kemendagri menyampaikan secara terbuka mekanisme monitoring dan evaluasi DOB yang telah menerima alokasi anggaran dari pusat.

“Kita perlu tahu, apakah dana itu benar-benar digunakan untuk percepatan pembangunan? Dan jika tidak, apa sanksi atau langkah koreksi yang dilakukan? Jangan sampai pembentukan DOB hanya jadi proyek politik jangka pendek yang melupakan esensi otonomi,” pungkasnya.



“Kita bisa lihat data yang menunjukkan bahwa PAD mereka hanya menyumbang 1-2 persen dari total APBD, sementara sisanya bergantung pada DAU atau DAK. Bahkan beberapa daerah sempat mengalami krisis keuangan hingga layanan dasar terhenti. Artinya, DOB ini bukannya menjadi solusi pembangunan, tapi justru beban baru,

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi II DPR RI



Anggota FPKS Surahman Minta Pelaku Pencabulan Modus Pengobatan Alternatif Spiritual di Bekasi Segera Ditangkap

Jakarta (15/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat mengaku geram terhadap aksi bejat pelaku inisial M yang telah mencabuli puluhan perempuan dengan modus pengobatan alternatif spiritual di Pondok Melati, Bekasi.

“Saya mengutuk keras terhadap aksi pencabulan yang telah dilakukan pelaku M, apalagi aksi bejat tersebut dilakukan dengan ‘menjual’ agama sehingga dipercaya oleh masyarakat,” kecam Surahman.

Surahman mengatakan aksi bejat yang telah dilakukan oleh pelaku inisial M di Bekasi yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh agama telah mencoreng citra positif tokoh agama dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama.

“Saya minta Polri segera melacak dan menangkap pelaku yang saat ini tengah kabur melarikan diri,” ujar Surahman.

Surahman mengatakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, baik perlindungan fisik dengan menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban, pendampingan dalam proses hukum, bantuan hukum bagi

saksi dan korban, serta rehabilitasi psikologis dan medis untuk pemulihan mental dan fisik korban.

“Semoga Polri dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi para korban,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Surahman juga menghimbau agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif memilih pengobatan alternatif mengingat begitu maraknya aksi pencabulan dengan modus pengobatan.

“Saya prihatin atas kejadian yang dialami oleh para korban. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan selektif memilih pengobatan alternatif mengingat begitu maraknya aksi pencabulan dengan modus pengobatan, serta harus bersikap kritis terhadap penipuan berkedok pengobatan dan tindakan yang dilakukan selama proses pengobatan,” imbuh Surahman.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, baik perlindungan fisik dengan menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban, pendampingan dalam proses hukum, bantuan hukum bagi saksi dan korban, serta rehabilitasi psikologis dan medis untuk pemulihan mental dan fisik korban. Semoga Polri dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi para korban

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

Habib Aboe Dukung Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Berantas Premanisme

Jakarta (15/05) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu

dalam upaya memberantas praktik premanisme yang kian meresahkan masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP PKS ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan premanisme, baik yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan

"Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan mulia, yakni berperan aktif dalam pembangunan nasional, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika ada ormas yang justru melakukan tindakan premanisme, itu jelas melenceng dari tujuan dasar pembentukan ormas itu sendiri,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

(ormas) maupun kelompok lainnya, tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

"Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan mulia, yakni berperan aktif dalam pembangunan nasional, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika ada ormas yang justru melakukan tindakan premanisme, itu jelas melenceng dari tujuan dasar pembentukan ormas itu sendiri," ujar pria yang akrab disapa Habib Aboe.

Ia menyoroti bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum tertentu, apalagi jika mengganggu iklim investasi, merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

"Kita harus waspada. Misalnya, ada informasi mengenai kelompok yang meminta jatah

proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali. Ada juga aksi premanisme yang menghambat proyek pembangunan pabrik BYD dan Vinfast di Subang. Ini sangat membahayakan iklim investasi kita," tegasnya.

PKS memandang bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik semacam ini. Aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas terhadap segala bentuk intimidasi, pemerasan, atau pemaksaan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

"Premanisme dalam bentuk apa pun, baik skala kecil yang menyasar pelaku UMKM, maupun skala besar yang mengganggu proyek strategis, harus diberantas. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," pungkasnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif

Selamat & Sukses
**Dr. Jazuli
Juwaini, MA**

Terpilih Sebagai
**Ketua Umum Ikatan Doktor
Ilmu Manajemen (IKADIM)
Indonesia**





Tegaskan Urgensi Revisi UU Kehutanan, Abdul Kharis: Kelestarian Hutan Butuh Regulasi yang Adaptif

Samarinda (16/05) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya penyusunan ulang regulasi kehutanan nasional sebagai respons terhadap kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Jaring Pendapat yang digelar Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI bersama para akademisi dan pakar dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Kamis (15/05/2025).

Forum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara legislatif dan kalangan akademik guna membahas substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Selama lebih dari 20 tahun, UU Kehutanan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Namun, perubahan zaman dan meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan menuntut kita untuk melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada,” tegas Abdul Kharis.

Ia menyoroti peran penting hutan sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, hingga penggerak ekonomi dan budaya masyarakat, khususnya dalam konteks hutan tropis Indonesia yang termasuk terluas di dunia.

Namun, kenyataannya, Indonesia telah kehilangan lebih dari 33 juta hektar hutan dalam lima dekade terakhir, dengan angka deforestasi sebesar 28 juta hektar dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

“Kerugian ini tidak bisa dianggap remeh. Untuk itu, pembaruan regulasi menjadi langkah mendesak agar pengelolaan hutan bisa lebih adaptif, adil, dan berwawasan lingkungan,” ungkapnya.

Kegiatan Jaring Pendapat ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang

dilakukan oleh Komisi IV DPR RI. Sebelumnya, Panja RUU Kehutanan telah menyerap masukan dari Kementerian Kehutanan serta akademisi Universitas Gadjah Mada. Di hari yang sama, Komisi IV DPR juga menggelar jaring pendapat terpisah dengan akademisi Universitas Brawijaya terkait penyusunan RUU tentang Pangan.

Revisi UU Kehutanan telah masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI Nomor Urut 5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2024.

“Regulasi ini tidak semata-mata soal administrasi kehutanan, tapi menyangkut masa depan lingkungan, hak masyarakat, dan kesinambungan pembangunan nasional,” tutup Abdul Kharis.

“Selama lebih dari 20 tahun, UU Kehutanan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Namun, perubahan zaman dan meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan menuntut kita untuk melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada,”

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Harga Beras Dunia Turun,
Harga Beras Indonesia Naik,

Saadiah: Ada yang Keliru dalam Tata Kelola Pangan Nasional

Jakarta (16/05) — Di tengah tren penurunan harga beras dunia yang signifikan, masyarakat Indonesia justru dihadapkan pada kenyataan pahit: harga beras dalam negeri terus merangkak naik.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata akibat faktor global, tetapi lebih pada lemahnya tata kelola pangan nasional.

Menurut data dari FAO dan Bank Dunia, harga beras dunia pada April 2025 berada di kisaran USD 343–415 per metrik ton, atau sekitar Rp5,5 juta hingga Rp6,6 juta per ton dengan kurs Rp16.000/USD.

Harga ini menunjukkan penurunan hingga 22% dibandingkan tahun lalu. Penurunan disebabkan oleh membaiknya prod-

uksi global, dibukanya kembali ekspor oleh India, dan melemahnya permintaan dari negara-negara importir besar, termasuk Indonesia.

“Ini ironis. Saat harga dunia turun karena kelebihan pasokan, harga beras di dalam negeri justru melonjak. Ini membuktikan ada yang tidak sinkron antara dinamika global dan sistem distribusi pangan nasional kita,” ujar Saadiah dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat pagi.

Ia menyoroti sejumlah faktor yang diduga kuat menjadi penyebab lonjakan harga

domestik, mulai dari lemahnya pengendalian rantai distribusi, keterlambatan penyerapan panen petani oleh Bulog, hingga belum maksimalnya cadangan beras pemerintah (CBP) dalam meredam gejolak harga di pasar.

“Kalau harga gabah petani masih rendah, tapi harga beras konsumen mahal, maka jelas yang diuntungkan adalah tengkulak dan spekulan. Negara seharusnya hadir untuk menyeimbangkan, bukan justru membiarkan disparitas harga ini terus melebar,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Maluku ini mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi strategi stabilisasi harga pangan, mempercepat serapan beras petani lokal, dan memastikan bahwa kebijakan penghentian impor tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

“Jangan sampai narasi swasembada malah menutupi kegagalan dalam menjamin harga wajar bagi rakyat. Kita perlu reformasi tata kelola pangan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang menimbulkan euforia sesaat,” tutupnya.

Pernyataan ini disampaikan Saadiah Uluputty sebagai respons terhadap berbagai pertanyaan publik seputar ketidaksiuaian antara harga global dan kondisi pasar domestik yang semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.



“Ini ironis. Saat harga dunia turun karena kelebihan pasokan, harga beras di dalam negeri justru melonjak. Ini membuktikan ada yang tidak sinkron antara dinamika global dan sistem distribusi pangan nasional kita,”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

Harga Beras Dunia Turun, Aleg PKS Johan Rosihan: Mengapa Harga Beras Indonesia Naik?

Jakarta (16/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menanggapi pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono

yang mengklaim bahwa penghentian impor beras oleh Indonesia menjadi penyebab turunnya harga beras dunia.

Johan menilai klaim tersebut patut dikaji lebih kritis,

“Kebijakan pangan harus melindungi petani dan konsumen secara berimbang. Jangan sampai kebijakan jangka pendek justru menciptakan gejolak harga yang merugikan rakyat,”

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

terutama karena harga beras di dalam negeri justru terus melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kalau benar Indonesia membuat harga beras dunia turun karena setop impor, kenapa justru harga beras di pasar dalam negeri masih tinggi dan di atas HET? Ini kontradiktif dan perlu penjelasan berbasis data, bukan sekadar klaim sepihak,” kata Johan di Jakarta, Jum’at (16/05).

Mengacu pada data Badan Pangan Nasional per 15 Mei 2025, harga beras premium di tingkat konsumen berada di angka Rp15.629/kg, sedangkan HET untuk beras premium ditetapkan sebesar Rp14.900/kg. Sementara itu, harga beras medium tercatat sebesar Rp13.647/kg, melebihi HET sebesar Rp12.500/kg.

Johan mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Badan Pangan

Nasional, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan penghentian impor terhadap ketersediaan dan keterjangkauan beras di dalam negeri.

“Masalah sebenarnya ada di distribusi, stok, dan potensi persaingan harga oleh pedagang besar. Pemerintah harus serius mengatasi itu, bukan hanya bangga dengan klaim pengaruh global,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar cadangan beras pemerintah (CBP) diperkuat dari hasil panen dalam negeri dan distribusinya dipastikan berjalan efektif hingga ke wilayah rentan pangan.

“Kebijakan pangan harus melindungi petani dan konsumen secara berimbang. Jangan sampai kebijakan jangka pendek justru menciptakan gejolak harga yang merugikan rakyat,” tegas Johan.



Aleg PKS Riyono 'Caping': Perlu 'Mandatory Spending Anggaran untuk Kedaulatan Pangan

Jakarta (14/05) — Kedaulatan pangan sebuah negara sangat penting, negara yang kuat pangannya maka negara itu kuat dalam berbagai bidang. Membangun pangan jangka panjang akan mengurangi ketergantungan kepada negara lain.

Indonesia sering impor beras dari Vietnam, Pakistan, India dan juga Thailand dengan anggaran sampai puluhan triliun. Ketergantungan pangan akan memperlemah kedaulatan nasional kita.

"Urusan Pangan adalah urusan wajib yang harus menjadi prioritas di APBN seperti pendidikan yang dapat alokasi 20% setiap tahun, pangan tang bergizi dan sehat akan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM menuju 2045," papar Riyono Caping Aleg FPKS

Negara maju mengelola pangan dengan sangat serius, bahkan target mereka selalu ekspor. Negara kawasan ASEAN

saja berlomba untuk ekspor, kita kenal Jeruk Thailand, Jambu Bangkok, Beras Vietnam, Malaysia Durian Hitam, bahkan ayam saja terkenal di Indonesia Ayam Bangkok.

Negara kawasan Eropa yang secara iklim jauh lebih lengkap Indonesia juga maju dalam pertanian mereka, lihat saja Belanda yang menjadi salah satu kiblat Pertanian Hidroponik. Ada juga Jepang yang maju dalam sektor pertanian dan perikanan-nya.

Negara-negara maju pertaniannya memberikan subsidi anggaran pertanian sangat besar. Anggaran untuk sektor pertanian di Malaysia mampu

menyumbang sekitar 8,9% terhadap PDB Malaysia.

Dalam anggaran belanja negara 2021, Malaysia mengalokasikan dana RM1,7 miliar untuk subsidi petani dan nelayan, termasuk RM570 juta untuk harga padi dan RM960 juta untuk insentif budidaya padi.

"Pertanian Indonesia mampu menyumbang 12,3% terhadap PDB di tahun 2023, setiap tahun kontribusinya meningkat. Sektor Pertanian merupakan sektor yang strategis untuk pengentasan kemiskinan nasional" tambah Riyono.

Perlu dikaji untuk mendukung kedaulatan pangan yang merupakan cita-cita Presiden Prabowo bisa berjalan sistemis serta jangka panjang untuk mengalokasikan dana besar dan bersifat wajib untuk membangun sektor pertanian dalam arti luas. Ada pertanian, peternakan, perikanan darat dan juga kehutanan.

"Anggaran pertanian saat ini tidak sampai 5% dalam APBN atau sekitar 50 T (pertanian, perikanan, kehutanan) baru 0,18% dari APBN. Anggaran ini perlu di tingkatkan demi mencapai Asta Cita Presiden," tambah Riyono.

Menurut Riyono perlu adanya Mandatory spending APBN kepada sektor pertanian secara bertahap dalam 10 - 20 tahun ke depan. Agar ada kepastian dan jaminan akan kedaulatan pangan bagi rakyat yang



"Urusan Pangan adalah urusan wajib yang harus menjadi prioritas di APBN seperti pendidikan yang dapat alokasi 20% setiap tahun, pangan tang bergizi dan sehat akan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM menuju 2045,"

RIYONO, S.Kel., M.Si.
Anggota Komisi IV DPR RI

berasal dari produksi dalam negeri.

"Rasanya sudah cukup pengalaman 1984 kita swasembada dan mampu, tahun 2026

ini kita juga harus berjuang mampu swasembada kembali. Mandatory spending APBN untuk Pangan layak untuk di perjuangkan" tutup Riyono.

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

Tinjau Jembatan Suramadu, Reni Astuti Dorong Penjagaan Kualitas Kemantapan Jalan dan Keamanan bagi Masyarakat

Surabaya (10/05) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo), Reni Astuti melakukan kunjungan lapangan ke Jembatan Suramadu sebagai bentuk perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan para pengguna jembatan penghubung Surabaya–Madura tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Reni meninjau langsung ruang pusat kontrol aktivitas Jembatan Suramadu yang menjadi titik pengawasan lalu lintas dan kondisi struktural jembatan.

Reni diterima oleh Kabid KPJI Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, Sifa Udukha, beserta jajaran lainnya.

Reni menyampaikan bahwa perhatian terhadap fasilitas pendukung seperti CCTV, sistem monitoring kesehatan struktur jembatan, dan kehadiran petugas patroli harus ditingkatkan. Ia mendorong Kementerian PUPR untuk lebih serius mendukung

pemeliharaan dan pengawasan secara menyeluruh.

“Kunjungan ini adalah bentuk tanggung jawab kita untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna Jembatan Suramadu. Saya mengapresiasi petugas yang terus melakukan pemantauan aktif setiap saat,” ujar Reni.

Reni juga menyoroti pula aspek keamanan, khususnya terkait kasus kejahatan yang sempat terjadi di awal tahun.

“Pada Januari dan Februari lalu, Jembatan Suramadu diduga menjadi lokasi rawan curanmor. Ini menjadi perhatian serius. Saya mendorong agar

ada sinergi antara BPJN, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Rencana pengadaan mobil patroli atau petugas gabungan harus segera direalisasikan,” tegasnya.

Keberadaan Jembatan Suramadu sangat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas publik ini harus terjaga dari segi kualitas, keamanan serta kebersihannya.

“Kita harus cepat dan responsif terhadap kebutuhan publik. Infrastruktur seperti Suramadu bukan hanya penghubung wilayah, tapi juga tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Maka, kualitas dan keamanannya harus jadi prioritas,” tutup Reni.

Dalam penutupnya Reni berharap BPPJN sebagai penanggungjawab dari Jembatan Suramadu terus meningkatkan pengawasan dan penjagaannya terhadap fasilitas publik tersebut.



“Pada Januari dan Februari lalu, Jembatan Suramadu diduga menjadi lokasi rawan curanmor. Ini menjadi perhatian serius. Saya mendorong agar ada sinergi antara BPJN, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Rencana pengadaan mobil patroli atau petugas gabungan harus segera direalisasikan,”

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I

Apresiasi Digitalisasi Distribusi Pupuk,

BAKN DPR FPKS Amin: Pastikan Petani Dapat Pupuk Bersubsidi

Jakarta (09/05) — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Command Center Pupuk Indonesia, Jumat (9/5).

Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota BAKN DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. memberikan apresiasi atas inisiatif digitalisasi distribusi pupuk yang dilakukan Pupuk Indonesia melalui sistem digital monitoring dan pelacakan distribusi secara real-time.

Command center merupakan teknologi yang diterapkan Pupuk Indonesia dalam proses pengawasan rantai pasok pupuk dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga disalurkan ke petani di kios-kios pupuk.

Amin mengatakan bahwa command center itu merupakan bentuk transformasi digital yang dilakukan perusahaan.

“Sekarang ini kita sudah bisa melihat secara visual maupun secara data, mulai pupuk itu diproduksi, dimuat di kapal, kemudian kapalnya

bergerak ada GPS, masuk ke gudang di gudangnya ada CCTV, kemudian disalurkan ke kios, nanti di kios ditebus oleh petani dan nanti kelihatan secara visual,” ujar Amin Ak.

Melalui digitalisasi distribusi, Pupuk Indonesia mampu memantau stok, alokasi, dan penyaluran pupuk hingga ke level kios secara terintegrasi. Hal ini penting untuk mengatasi praktik penyelewengan dan memastikan petani mendapatkan haknya sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga memangkas regulasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan alokasi sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian provinsi.

Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025

Dasaraskan data Kementerian Pertanian RI, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Adapun kebutuhan total pupuk subsidi yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi itu mencapai Rp 46,8 triliun.

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi lebih dari 16 juta petani yang telah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Amin Ak menegaskan bahwa BAKN DPR RI akan terus mengawal efektivitas anggaran subsidi pupuk agar tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian nasional.

“Digitalisasi tidak boleh berhenti di sistem, harus ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan dan keterbukaan data. Kami mendorong Kementan dan Pupuk Indonesia untuk membuka akses data bagi publik dan pengawas,” tuturnya.



“Sekarang ini kita sudah bisa melihat secara visual maupun secara data, mulai pupuk itu diproduksi, dimuat di kapal, kemudian kapalnya bergerak ada GPS, masuk ke gudang di gudangnya ada CCTV, kemudian disalurkan ke kios, nanti di kios ditebus oleh petani dan nanti kelihatan secara visual,”

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI



image istimewa

Lindungi UMKM, Al-Qassam Kasuba Sambut Positif Langkah Menteri Maman Abdurrahman

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Dapil Maluku Utara, Izzuddin Al-Qassam Kasuba, menyambut positif langkah Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang kian agresif mendorong optimalisasi pasar domestik, diversifikasi ekspor, klasifikasi sektor, serta pendampingan

dan fasilitasi pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai respons dari kebijakan tarif yang dilakukan Donald Trump.

Menurut Al-Qassam, strategi empat pilar ini menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan di tengah gejolak ekonomi dunia, tetapi juga

“Ketergantungan pada satu tujuan ekspor membuat UMKM rentan. Kita harus merambah pasar Timur Tengah, Asia Tenggara, bahkan Amerika Selatan, agar fluktuasi di satu negara tidak melumpuhkan usaha.”

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku Utara

mampu memperluas jangkauan ke pasar internasional.

Aleg Muda itu memaparkan bahwa Indonesia dengan 275 juta jiwa menawarkan potensi pasar domestik luar biasa besar.

“Optimalisasi pasar lokal harus menjadi fondasi utama. Produk UMKM seperti kerajinan rempah dan kuliner tradisional memiliki daya tarik tinggi, asalkan diperkenalkan secara massif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, diversifikasi pasar ekspor dinilai penting untuk mereduksi risiko atas perubahan kebijakan tarif negara mitra dagang.

“Ketergantungan pada satu tujuan ekspor membuat UMKM rentan. Kita harus merambah pasar Timur Tengah, Asia Tenggara, bahkan Amerika Selatan, agar fluktuasi di satu negara tidak melumpuhkan usaha.”

Dalam upaya menekan biaya produksi dan memperkuat daya tawar, klusterisasi sektor

UMKM menjadi solusi strategis. Dengan menggabungkan para pelaku usaha dalam satu ekosistem ‘holding’, akses modal, teknologi, dan distribusi akan jauh lebih efisien.

“Akses permodalan bersama dan fasilitas pengolahan skala besar akan menurunkan biaya per unit, meningkatkan kualitas, dan mendorong volume produksi,” jelas Al-Qassam.

Ia juga mengingatkan pentingnya sertifikasi halal dan SNI agar produk UMKM bisa diterima di berbagai pasar dengan standar tinggi.

Pendampingan dan fasilitasi pemerintah, menurut Al-Qassam, harus menjangkau hingga pelosok desa. Mulai dari pelatihan manajemen usaha, digital marketing, hingga insentif fiskal bagi pelaku kluster.

Pemuda asal Maluku Utara itu optimis, dengan kolaborasi legislatif dan eksekutif yang kuat, UMKM di seluruh Indonesia akan tampil lebih tangguh, mandiri, dan mampu mengguncang pasar global.

Rofik Hananto Dorong Adanya Relaksasi Ekstra Terhadap Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM

Jakarta – (10/5) Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Rofik Hananto, mengatakan komitmennya dalam mendorong relaksasi ekstra terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Rofik mengatakan bahwa penguatan UMKM adalah kunci untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional, terlebih di tengah ancaman resesi global dan dampak pasca pandemi.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Tetapi sayangnya, mereka masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses permodalan. Inilah yang menjadi perhatian utama kami di parlemen.” ujar

Rofik.

Rofik menyampaikan bahwa meski pemerintah telah menyalurkan KUR dengan subsidi bunga dan penjaminan, kenyataannya di lapangan belum semua pelaku UMKM bisa mengakses fasilitas ini secara merata. Banyak di antara mereka belum familiar dengan proses administrasi, tidak memiliki agunan, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan fasilitas ini.

Rofik mendorong adanya relaksasi ekstra terhadap Kredit Usaha Rakyat. Relaksasi yang

dimaksud tidak hanya dalam bentuk pelanggaran syarat administratif dan jaminan, tetapi juga penyesuaian suku bunga, tenor yang lebih fleksibel, serta pendampingan teknis yang lebih intensif dan dekat ke akar rumput.

“Ini saatnya kita hadir lebih nyata bagi UMKM. Negara dan perbankan tidak boleh hanya menunggu. Kita harus aktif menjemput bola, melakukan pendampingan langsung di lapangan, mengedukasi pelaku usaha kecil, dan memastikan mereka mendapatkan haknya atas pembiayaan yang murah, cepat, dan aman.” Ujar Rofik.

Rofik menggarisbawahi bahwa memperkuat struktur dan akses pembiayaan UMKM adalah bagian dari strategi nasional dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi global. Negara-negara dengan fondasi UMKM yang kuat terbukti lebih tahan menghadapi krisis. UMKM bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga motor penggerak ekonomi riil dan pengaman daya beli masyarakat.

“Kita tidak boleh lengah. Di tengah ketidakpastian global, justru kita harus memperkuat ekonomi dari akar, dan itu adalah UMKM. Pemerataan akses KUR adalah jalan untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas.” Ujar Rofik.

Rofik menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan



“Kita tidak boleh lengah. Di tengah ketidakpastian global, justru kita harus memperkuat ekonomi dari akar, dan itu adalah UMKM. Pemerataan akses KUR adalah jalan untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas.”

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

UMKM, lembaga penjamin, serta lembaga keuangan tanpa menutup celah akses ini. Tanpa kolaborasi lintas sektor, KUR

akan sulit dirasakan secara merata oleh pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri.



image istimewa

Aleg PKS Netty: Pemerataan Layanan Kesehatan Penting, tapi Keselamatan Pasien yang Utama

Jakarta (15/05) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kesehatan mengkaji secara cermat rencana memberikan pelatihan pada dokter umum

Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.

Menurutnya, meski langkah ini muncul dari keprihatinan yang nyata, keselamatan pasien dan

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,”

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

standar profesi medis tidak boleh dikompromikan.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis, (14/05/2025).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan agar dokter umum di daerah 3T dapat menangani kasus-kasus darurat, terutama mengingat masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil.

Menanggapi hal tersebut, Netty mendorong Kemenkes

untuk mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis.

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, maka harus ada batasan kewenangan yang jelas, pengawasan ketat, dan regulasi yang akuntabel.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicarakan soal nyawa,” terangnya.

Anggota FPKS Kurniasih Mufidayati Dorong Penempatan Dokter Spesialis Transparan dan Obyektif

Jakarta (16/05) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyampaikan penempatan dokter spesialis dan sub spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah harus dilakukan secara profesional, transparan dan obyektif.

Bagi Kurniasih, yang terpenting juga adalah penempatan dokter spesialis dan sub spesialis dengan sistem mutasi tidak boleh mengorbankan pelayanan medis kepada masyarakat. Ia menyebut saat ini jumlah kebutuhan subspecialis sangat terbatas, dan tidak semua rumah sakit punya kebutuhan dan fasilitas yang sama.

Menurut dia, ada risiko pelayanan terganggu jika mutasi dilakukan tanpa pertimbangan keahlian mendalam yang

dimiliki tenaga medis tersebut serta perlunya pemetaan kebutuhan SDM berbasis data real-time.

“Kami memahami bahwa proses penempatan tenaga medis, termasuk dokter spesialis dan sub spesialis, merupakan bagian dari sistem yang harus diatur. Mutasi adalah hal yang wajar. Namun, perlu jadi perhatian agar penempatan dan mutasi dilakukan secara terencana, transparan, obyektif dengan komunikasi yang baik,

dan memperhatikan kesinambungan layanan kesehatan. Jangan meninggalkan pasien begitu saja,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (16/05).

Menurutnya, transparansi dan profesionalisme serta obyektif dalam penempatan menjadi penting agar seluruh pihak yang terlibat baik rumah sakit, dokter, maupun masyarakat memiliki kejelasan informasi dan bisa saling mendukung untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan.

“Penugasan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan sub spesialis perlu mempertimbangkan data kebutuhan layanan, ketersediaan fasilitas, dan proses komunikasi yang positif. Kami percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat kepercayaan dan mendukung semangat pengabdian para tenaga kesehatan,” jelas politisi Fraksi PKS ini.

“Penempatan dan mutasi dokter sebagai tenaga pendidik di hospital based ataupun university based, juga tidak boleh mengganggu proses pendidikan calon-calon dokter spesialis dan sub spesialis,” tegas Kurniasih.

Ia menambahkan, penempatan dan mutasi tenaga medis dan tenaga kesehatan juga harus sesuai prosedur berdasarkan evidence based yang ada.



“Penugasan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan sub spesialis perlu mempertimbangkan data kebutuhan layanan, ketersediaan fasilitas, dan proses komunikasi yang positif. Kami percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat kepercayaan dan mendukung semangat pengabdian para tenaga kesehatan,”

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



Image istimewa

Aleg PKS Gamal Soroti 20% Anggaran Pendidikan untuk Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga Kedinasan

Jakarta (09/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dr. Gamal Albinsaid menanggapi anggaran pendidikan 20% APBN yang dibagi ke Kementerian/ Lembaga serta mencakup anggaran bagi pendidikan kedinasan di Kementerian/Lembaga lain.

Menurut Anggota Komisi X, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UU No.2 Tahun 2003 tentang sisdiknas 'Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20%

"Evaluasi menunjukkan bahwa dari total 124 PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga), terdapat variasi dalam penyelenggaraan, yaitu 15 PTKL menyelenggarakan pendidikan kedinasan, 87 PTKL menyelenggarakan pendidikan non-kedinasan, dan 22 PTKL menyelenggarakan keduanya,"

dr. GAMAL ALBINSAID

Anggota Komisi X DPR RI

dari APBD'.

"Kedua putusan MK No 024/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 'Dana Pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD," ungkapnya.

Ketiga, imbuhnya, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga) menegaskan biaya penyelenggaraan PTKL kedinasan pada jalur pendidikan formal tidak termasuk dalam 20% APBN yang dialokasikan ke sektor pendidikan.

"Evaluasi menunjukkan bahwa dari total 124 PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga), terdapat variasi

dalam penyelenggaraan, yaitu 15 PTKL menyelenggarakan pendidikan kedinasan, 87 PTKL menyelenggarakan pendidikan non-kedinasan, dan 22 PTKL menyelenggarakan keduanya," ujar Anggota DPR RI asal Dapil Malang Raya ini.

Selain itu, lanjut Gamal, KPK sejak tahun 2018 sudah mengatakan adanya tumpang tindih kewenangan serta pemborosan anggaran dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

"Oleh karena itu, seyogyanya anggaran PTKL kedinasan tidak menggunakan 20% anggaran pendidikan dan kita harus mengevaluasi terkait tumpang tindih kewenangan, serta pemborosan anggaran dalam pengelolaan pendidikan tinggi," tutup Aleg muda PKS ini.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Abstraktif Substantif

BANGKIT BERSAMA

UNTUK INDONESIA KUAT



Memperingati 117 Tahun
Hari Kebangkitan Nasional
20 Mei 2025



Legislator PKS: Maksimalkan Penerimaan Pajak yang Belum Optimal, Legalisasi Kasino Bukan Solusi!

Jakarta (14/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyatakan ketidaksetujuan terkait usulan legalisasi kasino untuk menambah pemasukan negara.

Anis menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan memang merupakan sumber utama pendapatan negara.

"Kontribusinya mengisi sekitar 80 persen dari pendapatan negara. Dengan porsi yang sedemikian besar, pendapatan negara sangat tergantung pada realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya," katanya, di Komplek Perlemen, Jakarta (14/05).

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan secara umum penerimaan perpajakan di Indonesia belum maksimal. Tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah, dibawah 10 persen.

"Level tersebut sangat kecil dibandingkan kapasitas ekonomi nasional yang telah

melebihi Rp20 ribu triliun. Dengan tax rasio yang terbatas, Indonesia akan kesulitan dalam memacu kontribusi konsumsi pemerintah. Jika pun dipaksakan maka hal itu akan meningkatkan utang dalam jumlah besar," ujarnya.

Legislator PKS ini menjelaskan memang tantangan untuk memacu penerimaan perpajakan perlu menjadi perhatian pemerintah, apalagi kita memerlukan dana besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Sebetulnya, kita masih punya banyak peluang menghasilkan penerimaan perpajakan karena banyak sektor perekonomian yang masih undertax alias belum optimal penerimaan pajaknya, justru perlu intensifikasi tanpa mengabaikan ekstensifikasi,"

katanya.

Anis menyebut Inten ifikasi perpajakan bisa dilakukan dengan menekan undertax pada berbagai sektor perekonomian. Undertax tersebut, misalnya, disinyalir terjadi pada sektor ekonomi digital dan sektor pertambangan. "Ini yang harus dikejar," ujarnya.

"Tiba-tiba ada wacana melegalkan kasino, kita sangat khawatir soal ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana perjudian dan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia selain berdampak negatif bagi generasi ke depan. Judi ilegal online saja sudah sangat mengancam perekonomian," tegas Anis.

Ketua DPP PKS Bidang EKUIN ini menyebut dengan mengoptimalkan kekayaan Indonesia seharusnya penerimaan perpajakan kita sangat aman dan sustain.

Anis menyebut jangan sampai pembangunan kita dibiayai dari uang-uang yang



"Sebetulnya, kita masih punya banyak peluang menghasilkan penerimaan perpajakan karena banyak sektor perekonomian yang masih undertax alias belum optimal penerimaan pajaknya, justru perlu intensifikasi tanpa mengabaikan ekstensifikasi,"

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

tidak halal. Masih banyak sumber lain yang belum kita gali. Bahkan, yang saat ini ada masih banyak ekonomi kita undertax.

"Ini cukup mudah melihatnya, kita sandingkan saja antara belanja perpajakan dengan realisasi penerimaan perpajak-

an, Logikanya, kalau belanja perpajakan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi maka ketika lapangan usaha tersebut terakselerasi maka penerimaan perpajakan seharusnya meningkat," pungkasnya.



image istimewa

Tolak Wacana Legalisasi Judi, Aleg PKS Kholid: Jauh Lebih Banyak Mudarat daripada Manfaat

Jakarta (14/05) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Juru Bicara DPP PKS, Muhammad Kholid, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana legalisasi tempat judi atau kasino di Indonesia.

Menurutnya, legalisasi judi bukan hanya bertentangan dengan Pancasila, konstitusi dan nilai-nilai moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada potensi penerimaan negara yang dihasilkan.

"Penerapan legalisasi judi mungkin akan sedikit meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Tetapi, biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi judi sangat besar dan merusak kehidupan masyarakat," tegas Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/05).

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa dampak sosial dari perjudian sangat signifikan. Dalam *The Social and Economic Impacts of Gambling* (2011), para peneliti dari Canadian Consortium for Gambling Research menyoroti bahwa perjudian meningkatkan risiko kriminalitas, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, serta penurunan produktivitas ekonomi masyarakat. Jika dampak-dampak ini ditaksir secara kasar setara dengan 1% hingga 3%

dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka dalam konteks Indonesia dengan PDB sekitar Rp19.000 triliun, potensi kerugian sosial ekonomi akibat legalisasi judi dapat berkisar antara Rp190 triliun hingga Rp570 triliun per tahun.

Sementara itu, menurut ekonom Earl L. Grinols dalam bukunya *Gambling in America: Costs and Benefits* (2004), studi berbasis data Amerika Serikat menemukan bahwa setiap 1 dolar penerimaan negara dari legalisasi judi menimbulkan kerugian sosial sebesar 7 hingga 10 dolar.

"Angka ini tentu kontekstual, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa industri judi lebih banyak membawa dampak destruktif daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan," jelas Kholid yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

"Jika perputaran uang judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun dan negara bisa memungut pajak 10%, maka potensi pene-



Tolak Wacana Legalisasi Judi, Aleg PKS Kholid: Jauh Lebih Banyak Mudarat daripada Manfaat

« SEBELUMNYA

rimaan negara hanya sekitar Rp.15 triliun. Namun, jika kita ikuti estimasi kerugian sosial seperti yang terjadi di banyak negara lain, maka biaya yang harus ditanggung masyarakat bisa mencapai Rp105 hingga Rp150 triliun per tahun. Ini jelas bukan pilihan rasional," ujarnya.

Kholid menegaskan bahwa ekonomi judi adalah simbol kerapuhan, kepaluan, dan kemalasan.

"Mayoritas pelaku judi di

Indonesia berasal dari kalangan masyarakat menengah bawah yang secara ekonomi mengalami keputusasaan. Negara punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberantas judi dan melindungi warganya dari dampak negatif, bukan justru melegalkannya. Ekonomi judi adalah ekonomi ilusi, bukan solusi bagi bangsa ini," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa industri judi adalah sektor ekonomi destruktif yang merusak jaringan sosial masyarakat

“Penerapan legalisasi judi mungkin akan sedikit meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Tetapi, biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi judi sangat besar dan merusak kehidupan masyarakat,”

**H. MUHAMMAD
KHOLID, S.E., M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI

dan mengalihkan sumber daya produktif ke sektor spekulatif.

"Daripada melegalkan judi yang jelas haram dan berisiko tinggi, lebih baik pemerintah fokus mendorong ekonomi halal dan memperkuat sektor keuangan syariah," sambung Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) itu.

Kholid memaparkan bahwa potensi ekonomi halal Indonesia sangat besar, dengan estimasi perputaran mencapai Rp4.375 triliun per tahun, potensi aset keuangan syariah sebesar Rp5.000 triliun, dan potensi ekspor produk halal hingga USD 100 miliar.

Di sektor ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, tetapi realisasinya baru sekitar Rp30 triliun. Sementara potensi aset wakaf tanah diperkirakan lebih dari Rp2.000 triliun, namun mayoritas belum dimanfaatkan secara produktif.

"Negara harus membangun ekonomi berbasis value creation, bukan value destruction. Judi mungkin terlihat memberi pemasukan cepat, tetapi biayanya jauh lebih mahal dan merusak tatanan sosial. Indonesia punya potensi besar membangun ekonomi yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui ekonomi halal. Itu jalan masa depan," pungkasnya.





Kunjungan ke Balongan dan PHE ONWJ, Nevi Zuairina Dorong Evaluasi Keamanan dan Transparansi Energi

Indramayu (10/05) -- Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Refinery Unit VI Balongan dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ),

anggota Komisi XII dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan sejumlah catatan penting yang menekankan aspek keselamatan, tanggung jawab sosial, serta transisi energi nasional.

Politisi PKS ini mengawali kunjungan dengan memberikan apresiasi terhadap kinerja RU VI Balongan yang telah berhasil memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi dan ramah lingkungan seperti Pertamina RON 92 dan Diesel Euro 5. Namun, ia menyoroti bahwa keberhasilan produksi tersebut harus diimbangi dengan komitmen kuat terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat.

"Kilang ini sudah mengalami beberapa kali insiden kebakaran dan ledakan. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai hal wajar. Evaluasi menyeluruh terhadap standar K3 dan relokasi warga yang tinggal di sekitar kilang harus menjadi prioritas nasional," tegas Nevi.

Terkait dengan pengembangan energi masa depan, Legislator Dunbar ini juga mempertanyakan progres pengembangan Sustainable

Aviation Fuel (SAF) dan teknologi hidrogen yang tengah digarap Pertamina. Menurutnya, kebijakan transisi energi tidak boleh hanya bersifat simbolik.

"Kami ingin tahu seberapa jauh keterlibatan investor, tantangan teknologi, dan dukungan regulasi dari Kementerian ESDM untuk menjamin bahwa SAF dan hidrogen bukan hanya jargon, tapi benar-benar menjadi alternatif yang siap pakai," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan manajemen PHE ONWJ di Cirebon, Nevi juga memberikan perhatian khusus terhadap

penurunan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan tua yang dikelola. Ia menanyakan strategi peningkatan produksi di tengah tekanan reservoir, serta pendekatan mitigasi terhadap insiden tumpahan minyak dan emisi karbon.

"Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan operasi tidak mengorbankan lingkungan dan keselamatan kerja," tambahnya.

Wakil rakyat Sumbar II ini mengharapkan, semua kilang di Indonesia perlu ditinjau kembali dari aspek keamanan, termasuk menyusun ulang tata ruang dan perizinan bagi pemukiman warga di sekitar fasilitas migas.

"Energi kita harus berdaulat, tapi juga harus berkeadilan bagi lingkungan dan masyarakat," pungkas Nevi Zuairina.

"Kami ingin tahu seberapa jauh keterlibatan investor, tantangan teknologi, dan dukungan regulasi dari Kementerian ESDM untuk menjamin bahwa SAF dan hidrogen bukan hanya jargon, tapi benar-benar menjadi alternatif yang siap pakai,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Dorong Penyelesaian Tuntas Pengalihan Aset PT INUKI ke BRIN, Muh Haris: Jangan Sampai 'Tragedi Irak' Terulang

Jakarta (16/05) -- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menekankan pentingnya penyelesaian segera terkait permasalahan pengalihan aset PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN), Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, dan Direktur Utama PT INUKI (Persero), yang digelar di Ruang Sidang Komisi XII, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Muh Haris menegaskan bahwa ketidakpastian dan tarik ulur penyelesaian aset PT INUKI tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih menyangkut pengelolaan limbah radioaktif dan keberlangsungan industri nuklir nasional.

"Nuklir adalah sumber energi potensial masa depan. Namun jika internal kita tidak mampu menyelesaikan masalah seperti ini, bagaimana bisa kita bicara tentang kedaulatan energi ke depan? Jangan sampai tragedi seperti di Irak terjadi—bukan karena serangan luar, tapi karena kelumpuhan internal akibat konflik berkepanjangan," tegas Muh Haris.

RDP ini membahas berbagai persoalan teknis dan administratif, termasuk status

lahan, pelimpahan aset tetap dan persediaan, serta biaya pelibahan dan dekontaminasi limbah radioaktif.

BRIN sebelumnya sempat menyatakan kesediaan menerima aset INUKI namun kemudian mencabut surat tersebut, memunculkan ketidakjelasan yang menambah kerumitan penyelesaian.

Muh Haris mendorong agar semua pihak, baik PT Bio Farma selaku induk holding,

BRIN, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan, segera duduk bersama dan mengedepankan solusi konkret serta menghindari saling lempar tanggung jawab.

"Ini bukan hanya soal aset dan regulasi administratif, tetapi menyangkut keselamatan publik dan strategi energi nasional. Indonesia harus punya roadmap industri nuklir yang kuat, dan itu dimulai dari tata kelola yang beres," tambahnya.

Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjadi mediator aktif guna memastikan seluruh proses pengalihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan berpihak pada kepentingan nasional.

"Nuklir adalah sumber energi potensial masa depan. Namun jika internal kita tidak mampu menyelesaikan masalah seperti ini, bagaimana bisa kita bicara tentang kedaulatan energi ke depan? Jangan sampai tragedi seperti di Irak terjadi—bukan karena serangan luar, tapi karena kelumpuhan internal akibat konflik berkepanjangan,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Komisi XII DPR RI



image Istimewa

Rusuh Akibat Barang Terlarang di Lapas Beliti, Anggota FPKS Meity: Pemberantasan Narkoba Jangan Goyah!

Makassar (13/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia menanggapi kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti Sumatra Selatan terjadi, Kamis pagi (08/05/2025).

Anggota Komisi XIII ini meminta Kementerian terkait tidak surut memberantas barang terlarang di Lapas.

"Di era pemerintahan Presiden Prabowo, masalah Narkoba dan sistem tata kelola

"Di era pemerintahan Presiden Prabowo, masalah Narkoba dan sistem tata kelola Lapas ini menjadi salah satu perhatian utama. Itulah tujuan kementeriannya dibuat secara mandiri agar fokus menyelesaikan pekerjaan yang terus berulang sejak lama ini. Pemberantasan Narkoba, termasuk di dalam Lapas tak boleh goyah. Kami terus mendukung pemerintah,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

Lapas ini menjadi salah satu perhatian utama. Itulah tujuan kementeriannya dibuat secara mandiri agar fokus menyelesaikan pekerjaan yang terus berulang sejak lama ini. Pemberantasan Narkoba, termasuk di dalam Lapas tak boleh goyah. Kami terus mendukung pemerintah," ungkapnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu berharap pembenahan sistem keamanan dan pembinaan di Lapas segera tuntas.

"Perubahan menuju kondisi yang lebih baik pasti mendapat hambatan dan tantangan. Semoga satu hingga dua tahun

pemerintahan sekarang, persoalan ini tuntas," pungkasnya.

Seperti diketahui, kerusuhan bermula dari rencana petugas Lapas Beliti merazia barang-barang terlarang di dalam Lapas.

Mendengar rencana itu, sejumlah napi kemudian memprovokasi warga binaan lainnya sehingga kekacauan pun terjadi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipap) Agus Andrianto mengungkap kerusuhan teratasi setelah pihak Lapas meminta bantuan aparat kepolisian dan TNI.



Aleg PKS Hamid Noor Yasin: Kaburnya Napi KKB di Nabire Bukti Kerapuhan Sistem Pengamanan Lapas

Jakarta (12/05) --- Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hamid Noor Yasin, menanggapi serius insiden kaburnya tiga narapidana yang diduga terafiliasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.

Menurut Hamid, peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem keamanan lembaga pemasyarakatan di daerah rawan konflik.

Fakta bahwa CCTV dalam kondisi tidak berfungsi dan jumlah petugas sangat minim menjadi catatan serius bagi pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

"Ini bukan soal insiden biasa, tapi soal kerentanan keamanan nasional. Kita berbicara tentang napi berisiko tinggi yang bisa saja bergabung kembali dengan kelompok bersenjata. Maka, sistem pengamanan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi," tegas Hamid dalam pernyataannya di Jakarta.

Hamid menekankan bahwa kaburnya napi KKB berdampak langsung pada stabilitas masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Hamid juga menyayangkan terjadinya penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan olah TKP di dalam lapas, yang diduga dipicu oleh teriakan provokatif dari dalam

blok tahanan.

"Ini menunjukkan bahwa kontrol internal lapas sudah sangat lemah. Tidak hanya napi bisa kabur, tapi juga mampu memprovokasi kerusakan terhadap aparat negara.

"Oleh karena itu, isu ini harus mendapatkan serius dari berbagai pihak, baik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maupun pihak kepolisian," tambah Hamid yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (Kabupaten Karangayar, Kabupat-

en Sragen, dan Kabupaten Wonogiri).

Oleh karena itu, HNY, sebutan akrab Hamid Noor Yasin, mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh Lapas di wilayah Papua dan Papua Tengah, khususnya yang menampung napi teroris atau peparatis. Selain itu, ia mengusulkan Peningkatan pengawasan terhadap infrastruktur keamanan seperti CCTV dan sistem penguncian. Hamid juga menambahkan perlunya rekrutmen dan pelatihan intensif bagi petugas pemasyarakatan, serta distribusi personel secara proporsional sesuai tingkat risiko tahanan.

"Negara harus hadir dengan ketegasan dan kecermatan. Kita tidak boleh abai terhadap risiko keamanan nasional hanya karena alasan keterbatasan sumber daya. Jika perlu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus ditingkatkan," tutup Hamid.

"Ini bukan soal insiden biasa, tapi soal kerentanan keamanan nasional. Kita berbicara tentang napi berisiko tinggi yang bisa saja bergabung kembali dengan kelompok bersenjata. Maka, sistem pengamanan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi,"

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota Komisi XIII DPR RI



Tanggal Lahir :
6 April 1967



Dapil: Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY)



Pendidikan

- SMA N 2 Klaten, Jawa Tengah (1982-1985)
- S1: Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1985-1995)
- S3: Chemical Engineering, The University of Salford, UK (1999-2005)



Pekerjaan

- Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2009-2014).
- Anggota DPR RI (2014-2019), (2019-2024) & (2024-2029)



Riwayat Organisasi

- Ketua MPW PKS DIY (2006-2010)
- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY (2010 - 2015)
- Sekretaris Bidang Polhukam, DPP PKS (2019-2023)
- Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS (2017 sekarang)



Sosial Media

- Instagram | Facebook | x | Tiktok
@dr.sukamta



H.

Sukamta

Ph.D

Regulasi Transportasi Online Harus Dirombak,

Muh. Haris Serukan Revisi UU dan Keadilan bagi Ojol

Bekasi (14/05) — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS, Muh. Haris, menggelar Forum Group Discussion (FGD)

bertajuk 'Menata Ulang Regulasi Transportasi Online yang Berkeadilan' bersama para pengemudi ojek online (ojol) di Alun-Alun M. Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat.

FGD ini menjadi ruang terbuka bagi para pengemudi ojol untuk menyuarakan tuntutan dan harapan mereka kepada legislatif, terutama soal status hukum, sistem kemiripan, hingga pembagian komisi yang dinilai belum adil.

Dalam forum yang berlangsung hangat ini, Muh. Haris menyampaikan perlunya reformasi regulasi untuk menjawab ketidakpastian status hukum para pekerja ojol.

Ia menyoroti dua tuntutan utama yang disampaikan para peserta: revisi Undang-Undang untuk memperjelas status kerja dan keinginan agar pembagian komisi diatur lebih adil.

"Sebagian menginginkan

status sebagai mitra, sebagian lagi sebagai pekerja. Maka perlu revisi undang-undang agar status mereka lebih pasti. Ini menyangkut hak-hak dasar seperti pendapatan dan asuransi," ujar Muh. Haris dalam paparannya.

Terkait isu pembagian komisi yang menjadi sorotan tajam, Muh. Haris menegaskan pentingnya transparansi dari pihak aplikasi dalam menentukan proporsi yang adil.

"Teman-teman menginginkan 10 persen. Kalau memang itu realistis dalam iklim industri saat ini, apa salahnya? Ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Pemerintah bisa ikut hadir sebagai regulator," tegasnya.

FGD ini dihadiri oleh sejumlah komunitas ojol dari wilayah Bekasi dan sekitarnya. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa permasalahan yang mereka hadapi bukan hanya te-

knis operasional, tapi juga menyangkut perlindungan hukum dan kesejahteraan jangka panjang.

Sayangnya, agenda diskusi ini sedikit tercoreng dengan ketidakhadiran perwakilan dari perusahaan aplikasi. Hal ini disayangkan oleh Muh. Haris yang menganggap FGD ini sebagai momentum strategis untuk berdialog langsung dengan para pemangku kepentingan.

"Hari ini kita sangat kecewa, sangat prihatin dengan ketidakhadiran beberapa perusahaan aplikasi. Kita ini DPR, lembaga tinggi negara. Kita dipilih dari rakyat. Kalau mereka bicara tentang regulasi tapi tak hadir, apa artinya kita bicara sesuatu yang bersangkutan tapi pihaknya tidak ada," ungkapnyanya dengan nada kecewa.

Muh. Haris menutup forum dengan ajakan untuk membawa hasil diskusi ini ke Senayan dan mengundang ulang perusahaan aplikasi ke DPR agar dialog dapat dilanjutkan secara lebih formal dan konstruktif.



"Hari ini kita sangat kecewa, sangat prihatin dengan ketidakhadiran beberapa perusahaan aplikasi. Kita ini DPR, lembaga tinggi negara. Kita dipilih dari rakyat. Kalau mereka bicara tentang regulasi tapi tak hadir, apa artinya kita bicara sesuatu yang bersangkutan tapi pihaknya tidak ada,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI



Silaturahmi dengan Bank Sampah Kabupaten Bekasi, Haji Jalal Dukung Program Lingkungan Berkelanjutan

Cikarang Barat (15/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir melakukan pertemuan dengan anggota Forum Bank Sampah Kabupaten Bekasi (BSB)

di Masjid Baitul Makmur, Perumahan Telaga Sakinah, Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Ahad, (11/05/2025).

Kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh ratusan anggota

Kegiatan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan solusi bagi masalah sampah, serta membangun kesadaran bersama untuk menjadikan lingkungan lebih bersih dan sehat.

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

bank sampah yang berasal dari berbagai unit di Kabupaten Bekasi, yang turut serta dalam mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis sosial.

Dalam acara tersebut, Haji Jalal memberikan sambutan yang memotivasi para peserta untuk terus mendukung keberlanjutan bank sampah yang dapat memberi manfaat besar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

"Bank sampah bukan hanya mengelola sampah, tapi juga mendukung perekonomian masyarakat melalui bisnis sosial yang berkelanjutan," ujar Haji Jalal.

Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat komitmen bersama dalam upaya pengelolaan sampah

yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Bekasi.

Terlihat dari antusiasme peserta yang berfoto bersama, simbolis semangat kebersamaan dalam mendukung gerakan sosial berbasis lingkungan.

Kegiatan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan solusi bagi masalah sampah, serta membangun kesadaran bersama untuk menjadikan lingkungan lebih bersih dan sehat.

Dengan acara ini, diharapkan Bank Sampah Kabupaten Bekasi dapat semakin berkembang, dan para anggotanya semakin termotivasi untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan sampah berbasis sosial yang berdampak besar bagi masyarakat.

Hendry Munief Siap Berkolaborasi Kembangkan Pulau Rupat dan Desa Wisata dengan Bupati Bengkalis

Kabupaten Duri (09/05) --- Bupati Bengkalis Kasmarni saat ini sedang serius mengembangkan desa wisata di Kabupaten Bengkalis. Dukungan datang dari anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief yang merupakan Mitra dari Kementerian Pariwisata.

Hal itu disampaikan Hendry Munief MBA saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Pemasaran Wisata Nusantara melalui Promosi Desa Wisata yang dilaksanakan di Kota Duri pada Jumat (09/05/2025) sore.

Hadir saat itu Muharoni Fikky Saputra sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama, Asdep Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Muchamad Iqbal Arief sebagai Analis Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asdep Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata. Sementara Bupati Kasmarni hadir langsung bersama jajarannya.

Bupati Kasmarni dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Hendry Munief bersama Kementerian Pariwisata memilih Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah penyelenggaraan Bimtek Pemasaran Pariwisata ini, khususnya pengembangan Desa Wisata.

"Kami menyambut baik atas bimtek sebagai inisiatif kolaboratif dalam membangun destinasi wisata daerah. Apalagi saat ini kita sedang menggeliakan potensi Desa Wisata," kata Bupati Kasmarni di hadapan Hendry Munief dan peserta bimtek.

Sementara itu Hendry

Munief mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Bengkalis dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Hendry selaku Anggota Komisi VII yang merupakan Mitra Kementerian Pariwisata siap berkolaborasi dan membantu Pemkab Bengkalis mengembangkan sektor pariwisata.

"Kita siap berkolaborasi mengembangkan pariwisata di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis. Pemkab sudah membuat grand desainnya. Ini akan sangat memudahkan," kata Hendry Munief.

Dia juga menjelaskan bahwa Bengkalis pun ga salah satu kawasan wisata internasional yaitu Pulau Rupat sebagai landmark baru wisata Riau. Apalagi itu didukung oleh pengembangan desa wisata oleh Pemkab Bengkalis.

"Pulau Rupat ini jika kita serius bersama, bakal jadi kawasan wisata regional Asia Tenggara. Ini perlu kolaborasi kita bersama. Pemkab, pemprov dan kita di senayan," tutupnya.

Pelatihan ini diikuti oleh



"Kita siap berkolaborasi mengembangkan pariwisata di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis. Pemkab sudah membuat grand desainnya. Ini akan sangat memudahkan."

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Komisi VII DPR RI

75 peserta yang berasal dari berbagai desa di Bengkalis. Kemudian pada Sabtu (10/5/

2025) akan dilanjutkan pelatihan yang sama di Kota Duri juga.



image istimewa

Sosialisasikan Pentingnya Empat Pilar Di hadapan Siswa SMA, Surahman Hidayat Ajak Kokohkan Nilai dan Jati Diri Bangsa

Ciamis (16/05) — Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, mengadakan kegiatan sosialisasi 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di hadapan ratusan siswa SMAN 1 Lumbung, Ciamis, Jawa Barat, Kamis, (15/05/2025).

"Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, ramah, penuh dengan nilai-nilai kesopanan, dan memiliki jalinan persaudaraan yang erat satu dengan lainnya, namun sangat disayangkan kini nilai-nilai tersebut mulai memudar," ujar Legislator dari Fraksi PKS ini.

"Kita tidak boleh lupa bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa Indonesia,"

Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi III DPR RI

Surahman menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberitahukan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar agar dapat diimplementasikan dalam berpolitik dan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia.

"Pancasila sebagai pilar pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip, dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di wilayah Indonesia," papar Surahman.

Selanjutnya, Surahman memaparkan bahwa pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

"Agar dapat memahami dan mendalaminya, diperlukan pemahaman terlebih dahulu terkait makna Undang-Undang Dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-

prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945," ujar Surahman.

Pilar selanjutnya, imbuhnya, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam," terang Surahman.

Penerapan Pilar Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Pancasila yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia menjadi dasar negaranya.

"Kita tidak boleh lupa bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa Indonesia," tutup Surahman.

PENUH SESAK DI BALK JERUJI: PKS DESAK PEMBENAHAN LAPAS DI INDONESIA

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

number: Berita Publik PKS Graphic/Net

Menteri UU Pemasyarakatan No.32/2003, Lembaran Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga yang tempat yang menjalankan fungsi pembelaan terhadap Nampitana. Lapas menjadi bagian penting integrated Justice system, berperan menjerah keadilan & ketertiban masyarakat.

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

number: Berita Publik PKS Graphic/Net

DATA LAPAS DI INDONESIA

Tahun 2019	Tahun 2024
492 Lapas	531 Lapas

Kapasitas Lapas ± 145.000 (Maret 2025)

Pembuni Aktual ± 274.317 (Maret 2025)

Lapas di Indonesia Over-kapasitas hingga 130%

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

Lapas dengan kapasitas terbesar

1308 orang Lapas Khusus Kelas IA Gunung Sindur Bogor	1251 orang Lapas Perintis Kelas IA Tangerang	1234 orang Lapas Herkules Kelas IA Perampokan
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Lapas Perempuan
Terdapat 34 lapas khusus perempuan

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

PERMASALAHAN UMUM DI LAPAS

- Overkapasitas:** Rata-rata okupansi lapas di Indonesia 180% dari kapasitas, bahkan ruang kamar kerap diisi 2-3 kapasitas kemestiasan.
- Kondisi Lapas Memprihatinkan:** Tanggapan baik, sanitasi dan ventilasi buruk, fasilitas dasar (toilet, dapur, dll) kerap tidak memadai.
- Risiko Slip-Nagl sangat rendah:** Pengawasan lemah, rawan kecelakaan.
- Kekerasan antar napi dan Peredaran Narkoba:**
- Korupsi dan Pungli:** KPK menial pengelolaan lapas sangat rawan korupsi, melongkang, pungli, dan penyalahgunaan wewenang.
- Kesehatan dan Psikososial,** terutama bagi perempuan.

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

number: Berita Publik PKS DPR RI Graphic/Net

KASUS KONTROVERSIAL

- PEMBUNIHAN SESAMA NAPI, LAPAS MERAH MATA PALEMBANG (Des 2024)**
- PULIHARI NAPI KABUR, LAPAS KUTACANE (Des 2024)**
- KERUSUHAN PASCA RAZIA, LAPAS MUARA BELITI (Maret 2025)**

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

EVALUASI DAN SARAN KEBIJAKAN

- Reformasi Sistem Peradilan:** Utamakan tahanan rumah/kota kecil peralihan pra-sidang, penerangan pidana alternatif (denda, kerja sosial, dan rehabilitasi) untuk pelanggaran ringan.
- Kelembagaan:** Dorong program asimilasi dan reintegrasi masyarakat.
- Kelembagaan dan Kelembagaan:** Pembangunan lapas baru dengan ventilasi dan sanitasi yang layak.
- Kelembagaan dan Kelembagaan:** Asesli untuk untuk cegah korupsi.
- Kelembagaan dan Kelembagaan:** Pengembangan pendidikan, kepariwisataan, dan keterampilan warga binaan.

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

Di era pemerintahan Presiden Prabowo, masalah sistem tata kelola Lapas ini menjadi salah satu **perhatian utama**. Itulah tujuan kementerriannya (Imigrasi dan Pemasyarakatan) dibuat secara mandiri agar fokus menyelesaikan pekerjaan yang terus berulang sejak lama ini. **Berita Publik PKS DPR RI** **lapas tak boleh goyah.**

Hji. Meity Rahmatia
Anggota Komisi XIII DPR RI

PKS TV DPR RI | PKS DPR RI | @pakpdp | @pakdp | @pakpdp | @pakpdp

number: Berita Publik PKS DPR RI Graphic/Net



Image istimewa

Abdul Hadi Dukung Rencana Pembangunan Hub Senggigi dan Kuta oleh Gubernur NTB

Mataram (13/05) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Hadi menanggapi rencana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang akan membangun kawasan Senggigi dan Kuta Lombok Tengah menjadi hub transportasi laut.

Abdul Hadi menilai gagasan Pemprov NTB tersebut sangat bagus dalam rangka pengembangan alat transportasi laut untuk masyarakat di provinsi kepulauan seperti NTB ini.

Namun demikian kata Abdul Hadi, program pembangunan hub di Senggigi dan Kuta membutuhkan penguatan dari sejumlah aspek, terutama dari Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Artinya, imbuhnya, program infrastruktur publik tersebut harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan regulasi perencanaan pembangunan dan tata ruang.

"Menurut saya itu gagasan yang bagus ya, khususnya untuk transportasi atau angkutan orang. Namun demikian harus disesuaikan dengan regulasi RPJPD dan RTRW kita di NTB," kata Abdul Hadi kepada wartawan.

Menurut Anggota Fraksi PKS DPR RI ini, khusus di wilayah Senggigi saat ini sudah tersedia pelabuhan yang

melayani penyeberangan kapal cepat dari Senggigi menuju Padangbai Bali, dan sebaliknya.

"Tinggal dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana atau infrastruktur untuk mendukung fungsi pelabuhan sebagai hub. Sementara untuk di wilayah Kuta Lombok Tengah saat ini belum tersedia pelabuhan yang bisa dikembangkan menjadi hub port. Yang ada hanyalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang yang berlokasi di Desa Mertak, Kecamatan Pujut. Sehingga rencana bangun hub transportasi laut di Kuta membutuhkan perencanaan yang matang dan komunikasi yang bagus dengan pemerintah pusat," terang Anggota Komisi V DPR RI ini.

Menurut Hadi, untuk mematangkan rencana pembangunan infrastruktur berupa hub port tersebut, Pemda bisa menyampaikan usulan ke pemerintah pusat dengan harapan bisa mendapat dukungan dalam APBN 2026.

"Untuk sebuah usulan ke pusat, bisa kita sampaikan

Abdul Hadi Dukung Rencana Pembangunan Hub Senggigi dan Kuta oleh Gubernur NTB

« SEBELUMNYA

dalam pembahasan pendahuluan APBN 2026. Kita berharap kondisi keuangan kita kedepan bisa lebih baik,” ujar mantan pimpinan DPRD NTB ini.

Untuk diketahui, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Senggigi dan Kuta perlu menjadi hub transportasi laut sebagai bagian dari upaya menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Ini adalah salah satu dari tiga prioritas yang akan dijalankan

selain pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan.

“Mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini sudah turun izin untuk membuka jalur kapal cepat baru dari Bali ke Kuta dan ke Senggigi. Sehingga Kuta dan Senggigi akan menjadi hub. Orang yang mau pergi ke Bali bisa lewat Senggigi dan Kuta, pergi ke Labuan Bajo, pergi ke Teluk Saleh, Teluk Bima, Pantai Pink dan lainnya,” kata Lalu Muhamad Iqbal pekan kemarin.

Di dalam konsep hub transportasi laut ini terdapat pula moda transportasi seaplane atau pesawat amfibi yang dapat lepas landas dan mendarat di atas air.

Kata Iqbal, Kementerian Perhubungan dan Pemprov NTB dilibatkan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan dalam penyusunan regulasi baru seaplane.

Pentingnya transportasi berbasis seaplane lantaran NTB adalah provinsi kepulauan yang membutuhkan alternatif alat transportasi.

Sebagai langkah awal Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan telah mengurus izin operasional kapal cepat rute Bali – Senggigi dan Bali – Kuta.



“Tinggal dilakukan perbaikan dan peningkatan sarana atau infrastruktur untuk mendukung fungsi pelabuhan sebagai hub. Sementara untuk di wilayah Kuta Lombok Tengah saat ini belum tersedia pelabuhan yang bisa dikembangkan menjadi hub port. Yang ada hanyalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang yang berlokasi di Desa Mertak, Kecamatan Pujut.

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Dukung Ketahanan Pangan, Junaidi Auly Launching Rumah Pangan Lestari Sejahtera

Lampung (13/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly atau yang di sapa Bang Jun melaksanakan Launching Rumah Pangan Lestari Sejahtera (RPLS) di Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Program ini dilaksanakan dan di inisiasi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pemilihan serta upaya mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto terkait Ketahanan Pangan Nasional, Selasa, (13/05/2025).

"Penting bagi kita sebagai warga masyarakat peduli, mampu berinovasi, dan mandiri dari sisi ekonomi, khususnya ketahanan pangan baik pertanian maupun peternakan guna menjawab tantangan di Era Globalisasi dan Digitalisasi seperti saat ini",

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

Acara ini dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta pemuda yang beraktivitas sebagai peternak dan petani.

Putra daerah asli Lampung ini mengungkapkan rumah pangan lestari sejahtera ini tidak hanya fokus pada pertanian namun juga peternakan. Dari mulai pengolahan limbah rumah tangga untuk pakan maggot, hingga dijadikan pupuk organik dan pakan ternak.

"Program ini tidak hanya terfokus pertanian namun juga pengolahan limbah rumah tangga untuk pakan maggot, hingga dijadikan pupuk organik, pakan ternak seperti ayam, dan ikan,"kata Junaidi.

Junaidi menambahkan pentingnya kita sebagai warga masyarakat peduli, mampu berinovasi, dan mandiri dari sisi

ekonomi, khususnya ketahanan pangan baik pertanian maupun peternakan. Pada Era Globalisasi dan digital seperti saat ini kita di tuntut untuk berpikir lebih responsif melihat tantangan zaman.

"Penting bagi kita sebagai warga masyarakat peduli, mampu berinovasi, dan mandiri dari sisi ekonomi, khususnya ketahanan pangan baik pertanian maupun peternakan guna menjawab tantangan di Era Globalisasi dan Digitalisasi seperti saat ini", ungkap Junaidi.

Adapun hasil dari Rumah Pangan Lestari Sejahtera ini nantinya di jual di pasar sekitar agar dapat dinikmati oleh masyarakat umumnya dan penggiat program khususnya.



Legislator PKS Adang Daradjatun Dukung Satgas Pemberantasan Premanisme dan Ormas Bermasalah

Jakarta (13/05) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang bermasalah.

Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan ke Daerah Pemilihannya (Kundapil) di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng - Jakarta Barat dan Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara pada (10-11/05/2025).

Dalam sambutan dihadapan Konstituen, unsur Pimpinan Kecamatan/Kelurahan, Babinsa, Bimaspol, Relawan dan Tokoh Masyarakat lainnya, Adang juga mengapresiasi operasi yang dilakukan oleh Polda dan Kodam di berbagai daerah untuk menindak para preman.

Namun, menurut Adang, operasi seperti itu tidak boleh hanya dilakukan saat kasus premanisme sedang ramai dibicarakan.

"Penindakan harus dilakukan secara rutin agar masyarakat merasa aman," ujarnya.

Mantan Wakapolri ini mengatakan, pemerintah sebaiknya menggunakan dua pendekatan dalam menangani premanisme yaitu pendekatan strategis dan pendekatan taktis. Dikesempatan lainnya

dalam dialog via telepon bersama Pro 3 RRI (11/05/2025), Adang menekankan pentingnya menjalankan kedua pendekatan itu secara bersamaan dan berkelanjutan.

"Jangan hanya bertindak kalau masyarakat sudah ramai mengeluh," katanya.

Pendekatan strategis, kata Adang, bertujuan mengatasi akar masalah seperti kesulitan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja.

"Jangan hanya bertindak kalau masyarakat sudah ramai mengeluh," Pendekatan strategis, bertujuan mengatasi akar masalah seperti kesulitan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja. Banyak orang jadi preman karena butuh makan. Mereka harus dibina, diberi pelatihan, dan diarahkan ke pekerjaan atau usaha,"

"Banyak orang jadi preman karena butuh makan. Mereka harus dibina, diberi pelatihan, dan diarahkan ke pekerjaan atau usaha," jelasnya.

Untuk jangka panjang, Adang mendorong pemerintah membuka lebih banyak lapangan kerja agar aksi preman bisa berkurang dan iklim investasi menjadi lebih baik.

Sementara itu, pendekatan taktis dilakukan melalui penegakan hukum, terutama untuk pelaku yang sudah melakukan tindakan kriminal.

"Hukum harus ditegakkan secara tegas, tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pihak yang membekingi," tegasnya.

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

Anggota FPKS Alifudin Dukung Penguatan Program Bangga Kencana dan Pengentasan Stunting di Kalteng

Palangkaraya (09/05) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menggelar kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara ini dilangsungkan di Aula Arafah, Asrama Haji Kota Palangkaraya, dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pencegahan stunting. Dalam sambutannya, Alifudin menekankan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat dan berkualitas.

"Keluarga adalah garda terdepan dalam membangun peradaban bangsa. Melalui program Bangga Kencana ini, kita berharap mampu memperkuat

peran keluarga dalam pencegahan stunting sejak dini," ujar Alifudin di hadapan para peserta sosialisasi.

Politisi asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 ini juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah Kalimantan.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merealisasikan target penurunan angka stunting di Indonesia.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Heru Hidayat selaku tokoh masyarakat, Fitriyanto selaku Kepala Dinas DALDUKKBP3-APM Kota Palangkaraya, dan Sunarto Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.

Keduanya menyambut baik kehadiran Alifudin dan mengapresiasi dukungan dari anggota legislatif terhadap program-program BKKBN.

Dalam paparannya, Sunarto menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan program percepatan penurunan stunting, seperti Program GENTING, Tamasya, GATI, dan berbagai inovasi lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendukbangga.

Ia menambahkan bahwa dukungan DPR RI sangat dibutuhkan dalam mendorong perluasan program ini di masyarakat.

Lebih lanjut, Sunarto menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, BKKBN, dan legislatif sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan program Bangga Kencana.

"Kami siap bekerja sama dan berinovasi demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah," ucapnya.

Acara sosialisasi ini berlangsung interaktif, diwarnai dengan diskusi antara narasumber dan peserta serta pembagian doorprize.

Kegiatan ini diharapkan



"RUU pangan selain menguatkan posisi pangan lokal yang ada di sekitar kita juga harus mampu mengurangi 'Pangan Hilang' atau sisa dan makanan tak habis yang sering terjadi di masyarakat. Data Badan Pangan Nasional, setahun kehilangan pangan Indonesia mencapai 500 Triliyun, angka yang tidak sedikit,"

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan gizi anak, sekaligus memperkuat

komitmen lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.



image istimewa

Terima Audiensi Hiswana Migas Yogyakarta, Pertamina Patra Niaga dan Dirjen Migas, Haji Jalal Ajak Sinergi untuk Ketahanan Energi

Jakarta (16/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir, menerima kunjungan audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Yogyakarta bersama Perwakilan Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/05).

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan harapan pelaku usaha migas, khususnya di wilayah Yogyakarta, dalam rangka

memperkuat ketahanan energi nasional.

Haji Jalal menyambut baik inisiatif Hiswana Migas dan menekankan pentingnya kemitraan antara sektor swasta, BUMN, dan pemerintah.

"Kami mengapresiasi kehadiran Hiswana, Pertamina Patra Niaga, dan juga Dirjen Migas yang sudah menyampaikan berbagai aspirasi dan dinamika di lapangan. Ini adalah bentuk sinergi yang perlu terus dijaga agar distribusi energi, khususnya BBM dan LPG, dapat berjalan lancar dan merata," ujar Haji Jalal dalam sambutannya.

4 Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, mulai dari kendala dalam pendistribusian LPG subsidi, kebutuhan peningkatan kapasitas SPBE, hingga

pentingnya menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. HISWANA Migas menekankan perlunya komunikasi yang lebih intensif antara pelaku usaha dan regulator agar kebijakan di sektor migas dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Haji Jalal menyampaikan komitmennya untuk menjembatani aspirasi tersebut di tingkat kebijakan nasional.

"InsyAllah kami akan terus kawal agar pemerintah hadir secara adil dan berpihak pada rakyat serta pelaku usaha yang menjadi ujung tombak distribusi energi di daerah. Ketahanan energi tidak bisa dibangun sendiri, harus ada kolaborasi yang kuat antarsemua pihak," pungkasnya.

"InsyAllah kami akan terus kawal agar pemerintah hadir secara adil dan berpihak pada rakyat serta pelaku usaha yang menjadi ujung tombak distribusi energi di daerah. Ketahanan energi tidak bisa dibangun sendiri, harus ada kolaborasi yang kuat antarsemua pihak,

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



image istimewa

BKSAP DPR FPKS Mardani Ali Sera: Indonesia Dorong Solusi Konkret bagi Palestina dalam Konferensi Parlemen OKI

Jakarta (13/05) — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong solusi konkret bagi Palestina.

Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Standing Committee on Palestine, yang menjadi bagian dari rangkaian Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta.

"Alhamdulillahirabbil 'alamin, siang ini setelah pagi tadi dilaksanakan Executive Committee Meeting, kita melanjutkan dengan Standing Committee on Palestine. Luar biasa, semua delegasi sangat bersemangat untuk membantu Palestina," ujar Mardani usai menghadiri 13th Meeting of the Permanent Committee on Palestine di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Mardani menyebut, banyak ide dan usulan bermunculan dalam sidang tersebut, termasuk dari delegasi Parlemen Indonesia. Salah satu hal yang diapresiasi para delegasi adalah penggunaan bahasa Arab yang fasih dalam penyampaian Indonesia.

"Banyak delegasi yang terkejut dan memberikan apresiasi luar biasa," ungkap politisi Fraksi PKS itu.

Dalam forum tersebut, di-

bacha tiga agenda utama. Pertama, mengenai kondisi terkini di Palestina, di mana sebagian besar delegasi menekankan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan, pelaksanaan gencatan senjata, serta desakan agar Israel dihukum atas tindakan genosida yang dilakukannya.

Kedua, terkait situasi di Al-Quds (Yerusalem), yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Israel.

"Masjid Al-Aqsa di Al-Quds sudah menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan," ujar Mardani.

Ketiga, mengenai beban yang ditanggung negara-negara di sekitar Palestina seperti Suriah, Lebanon, dan Yordania yang menampung banyak pengungsi Palestina. "Kita juga harus turut me-ngurus dan membantu mere-ka," imbuhnya.

Mardani menambahkan, terdapat usulan pembentukan Kaukus Permanen untuk Palestina yang akan segera melakukan kunjungan langsung ke Gaza dan membawa bantuan kemanusiaan.

BKSAP DPR FPKS Mardani Ali Sera: Indonesia Dorong Solusi Konkret bagi Palestina dalam Konferensi Parlemen OKI

« SEBELUMNYA

la juga menyinggung agenda penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar pada 11 Juni 2025.

"Tanggal 11 Juni akan ada pembahasan khusus tentang Palestina di PBB. Seluruh negara diminta untuk bersatu," jelas legislator Komisi II DPR RI

tersebut.

Di akhir pernyataannya, Mardani menekankan pentingnya aksi boikot terhadap semua pihak yang mendukung genosida terhadap rakyat Palestina.

"Boikot tidak hanya ditujukan kepada Israel, tetapi juga terhadap negara-negara dan entitas yang mendukung kejahatan genosida yang

dilakukan Israel," tegasnya.

Lebih lanjut, Mardani menyampaikan bahwa Sekretariat Indonesia tengah menyusun rancangan resolusi yang akan diajukan dalam Standing Committee on Political.

Resolusi tersebut nantinya akan menjadi bagian dari Jakarta Declaration atau Senayan Declaration yang akan menjadi platform kerja sama seluruh anggota PUIC.

"Hari ini masukannya sangat banyak. Malam ini, Sekretariat bersama Indonesia akan merumuskan draf resolusi yang besok akan diajukan untuk disahkan sebagai dokumen resmi kita," tutupnya.



"Boikot tidak hanya ditujukan kepada Israel, tetapi juga terhadap negara-negara dan entitas yang mendukung kejahatan genosida yang dilakukan Israel,"

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI



Dorong Negara-Negara Islam Aktif Lindungi Minoritas Muslim Lewat Diplomasi Parlemen

Jakarta (13/05) --- Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Sohibul Iman menegaskan pentingnya upaya aktif dari negara-negara Islam untuk melindungi komunitas Muslim minoritas di berbagai negara.

Hal ini disampaikannya dalam Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Sidang Umum Persatuan Parlemen Anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang berlangsung pada 12-15 Mei 2025, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam penyampaianannya, Sohibul Iman mengangkat dua poin utama. Pertama, ia menyroti perlunya sistem monitoring terhadap negara-negara yang memiliki komunitas Muslim minoritas, khususnya dalam hal perundang-undangan yang berpotensi diskriminatif.

"Kita perlu melakukan monitoring terhadap negara-negara yang memiliki minoritas Muslim, terutama untuk memantau kemungkinan lahirnya undang-undang diskriminatif. Kalau kita bisa memitigasi sejak awal, itu lebih baik. Karena kalau sudah jadi undang-undang, akan sangat sulit untuk dibatalkan," ujar Sohibul kepada Parlemenaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025) merujuk pada kasus stateless

warga Rohingnya di Myanmar yang diklaim pemerintah berdasarkan dasar hukum nasional mereka.

Poin kedua yang ia sampaikan adalah pemanfaatan posisi tawar negara-negara anggota PUIC dalam hubungan bilateral. Ia menyangkan belum optimalnya pemanfaatan kekuatan diplomasi oleh negara-negara Islam yang memiliki kerja sama erat dengan negara-negara mayoritas non-Muslim.

"Negara-negara PUIC punya nilai bargaining yang kuat. Saat mereka menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara tempat tinggal

minoritas Muslim, mestinya kekuatan ini dimanfaatkan untuk melobi agar umat Muslim di sana diperlakukan dengan lebih baik," jelasnya.

Ia mencontohkan hubungan dagang besar seperti antara Arab Saudi dan negara lain dalam sektor energi yang dinilainya belum dimaksimalkan untuk kepentingan umat. "Kalau hubungan seperti itu tidak digunakan untuk kepentingan minoritas Muslim, sangat disayangkan," tambahnya.

Politisi Fraksi PKS itu juga menekankan pentingnya peran para anggota parlemen dalam mendorong pemerintah masing-mening untuk lebih aktif menyuarakan isu-isu umat. Ia berharap pemimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Persatuan Parlemen Anggota OKI, Mardani Ali Sera, dapat memainkan peran penting dalam melobi negara-negara Islam untuk bertindak lebih strategis.

"Negara-negara PUIC punya nilai bargaining yang kuat. Saat mereka menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara tempat tinggal minoritas Muslim, mestinya kekuatan ini dimanfaatkan untuk melobi agar umat Muslim di sana diperlakukan dengan lebih baik,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, M.Eng., Ph.D.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI



Pertemuan Bilateral BKSAP-Liga Parlemen untuk Al-Quds Tegaskan Langkah Konkret untuk Palestina

Jakarta (13/05) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera dan Ketua Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina Syahrul Aidi Maaizat menegaskan pentingnya langkah konkret dalam

Hal ini mereka sampaikan kepada Parlemenaria usai menerima Leagues of Parliamentarians for Al-Quds (LP4Q) di sela Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang berlangsung di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/05/2025).

Dalam pertemuan tersebut, dua poin penting menjadi fokus diskusi. Pertama, upaya merumuskan roadmap yang jelas menuju kemerdekaan Palestina dengan mendorong keterlibatan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia.

Kedua, penguatan struktur kelembagaan Leagues of Parliamentarians for Al-Quds di tingkat regional.

“Kita membahas bagaimana roadmap menuju kemerdekaan Palestina yang bisa mempengaruhi negara besar untuk turut serta, dan yang kedua adalah memperkuat struktur organisasi Parlemen Al-Quds di kawasan,” ujar Mardani.

Sementara itu, Syahrul Aidi Maaizat menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggara-

raan konferensi PUIC yang menurutnya telah menyerap berbagai catatan penting dari Indonesia ke dalam rekomendasi resmi forum.

Ia menilai dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya konsisten, tetapi semakin kuat di bawah pemerintahan saat ini.

“Alhamdulillah, catatan-catatan dari kami menjadi bagian dari rekomendasi konferensi ini. Indonesia harus terus memberikan dukungan konkret yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Palestina. Ini menja-

di amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan,” kata Syahrul.

Lebih lanjut, Syahrul juga mengapresiasi sikap tegas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sejalan dengan semangat parlemen dalam membela Palestina.

“Gerakan kita di parlemen sangat terasa sinkron dengan sikap pemerintah. Ini menjadi kemajuan besar, terutama bagi pejuang-pejuang Palestina di level legislatif,” tutur Politisi Fraksi PKS ini.

Keduanya sepakat bahwa perjuangan bagi kemerdekaan Palestina harus terus dilakukan tidak hanya melalui diplomasi simbolik, tetapi juga melalui langkah-langkah konkret dan terkoordinasi baik di dalam negeri maupun bersama komunitas internasional.

“Kita membahas bagaimana roadmap menuju kemerdekaan Palestina yang bisa mempengaruhi negara besar untuk turut serta, dan yang kedua adalah memperkuat struktur organisasi Parlemen Al-Quds di kawasan,”

**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Komisi V DPR RI



Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di Sidang PUIC,

Sekjend PKS: Powerfull, Sarat Nilai Historis dan Komitmen Bela Palestina

Jakarta (15/05) — Sekjend DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,

dalam Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Gedung DPR RI pada Rabu malam, (14/05/2025).

Pidato Presiden yang sarat makna, dinilai mampu menggugah semangat persatuan dunia Islam dan menunjukkan sikap tegas Indonesia dalam membela hak-hak rakyat Palestina.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyebut pidato Presiden Prabowo sebagai pidato yang powerful dan sangat menginspirasi.

Menurutnya, Presiden tidak hanya menyampaikan pandangan politik luar negeri, tetapi juga merefleksikan pelajaran sejarah dari para tokoh besar dunia Islam seperti Khalid bin Walid, Shalahuddin Al-Ayyubi, hingga Muhammad Al-Fatih.

"Kami mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang sangat menggugah. Bukan hanya karena keberpihakan beliau yang jelas terhadap Palestina, tetapi juga karena kedalaman khazanah sejarah Islam yang beliau hadirkan. Ini menunjukkan kapasitas seorang pemim-

pin yang memahami akar peradaban dan mampu menggunakannya sebagai daya ungkit membangkitkan kembali peran strategis dunia Islam masa kini," ujar Habib Aboe Bakar "Penggalan-penggalan sejarah yang diangkat oleh Presiden Prabowo bukan sekadar retorika, melainkan strategi komunikasi yang cerdas untuk membangun kesadaran kolektif dan mempersatukan negara-negara anggota OKI di tengah tantangan global yang semakin kompleks", paparnya.

Lebih lanjut, Habib Aboe Bakar juga menyoroti penekanan Presiden terhadap pentingnya solidaritas dan persatuan di antara negara-negara Islam. Dalam konteks global yang diwarnai ketidakadilan dan konflik berkepanjangan, terutama terhadap rakyat Palestina, pidato tersebut dinilai tepat dan relevan.

"Isu Palestina mendapat porsi utama dalam pidato Presiden, dan ini sangat kami hargai. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah surut dalam membela hak-hak rakyat Palestina. Sikap ini selaras dengan konstitusi kita, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan tentu saja dengan amanat rakyat Indonesia yang mayoritas mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina," tegas Habib Aboe Bakar.

PKS berharap pidato tersebut tidak hanya menjadi catatan sejarah dalam forum internasi-



"Pidato ini menjadi momentum untuk membangun optimisme dan arah baru bagi diplomasi dunia Islam. Kita membutuhkan kepemimpinan yang berani, bernurani, dan berakar kuat pada nilai-nilai sejarah serta keadilan. Dan dalam pidatonya Presiden Prabowo menunjukkannya,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjend DPP PKS

onal, tetapi juga diterjemahkan ke dalam langkah konkret diplomasi Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral.

PKS juga menyerukan agar parlemen dan pemerintah negara-negara OKI segera memperkuat kerja sama nyata, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan untuk mendukung Palestina dan memulihkan kekuatan dunia

Islam secara kolektif.

"Pidato ini menjadi momentum untuk membangun optimisme dan arah baru bagi diplomasi dunia Islam. Kita membutuhkan kepemimpinan yang berani, bernurani, dan berakar kuat pada nilai-nilai sejarah serta keadilan. Dan dalam pidatonya Presiden Prabowo menunjukkannya," pungkas Habib Aboe Bakar.



Hadiri Pembukaan Sidang PUIC, Abdul Hadi Apresiasi Pidato Presiden Prabowo tentang Pembelaan pada Palestina

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menghadiri pembukaan Sidang Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) ke-19 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (14/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan di hadapan para delegasi negara Islam.

Pidato Presiden Prabowo luar biasa menyentuh. Saya, bersama seluruh peserta, memberikan standing applause atas keberanian dan ketegasan beliau dalam menyuatkan pembelaan terhadap dunia Islam, khususnya Palestina. Ini mencerminkan sikap konsisten bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkap Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga memberikan apresiasi khusus kepada

Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang telah terpilih sebagai Ketua PUIC, sebagai representasi aktif parlemen Indonesia di tingkat global dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam sedunia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga mengajak para pemimpin dunia Islam untuk meneladani para tokoh besar dalam sejarah Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan Salahuddin Al Ayyubi.

“Presiden mengajak kita semua merenungkan keteladanan para pemimpin besar ter-

sebut — keberanian, kecerdasan, dan keteguhan mereka dalam membela kebenaran serta keberhasilan mereka membangun peradaban Islam. Ini menjadi panggilan moral bagi seluruh umat Islam untuk bangkit dan bersatu” ujar Abdul Hadi

la juga menekankan pentingnya dunia Islam untuk kembali menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan peradaban.

“Islam pernah memimpin dunia dalam sains dan teknologi. Kini saatnya umat Islam bersatu dan bangkit kembali, tidak hanya untuk membela Palestina, tetapi juga untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat di negeri-negeri Muslim,” tegas Politisi PKS asal Lombok ini.

Sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat NTB, Abdul Hadi menyatakan bahwa semangat persatuan umat dan pembelaan terhadap Palestina harus menjadi agenda bersama dalam diplomasi Indonesia ke depan.

“Kami berharap, Indonesia bersama seluruh negara anggo-



“Pidato Presiden Prabowo luar biasa menyentuh. Saya, bersama seluruh peserta, memberikan standing applause atas keberanian dan ketegasan beliau dalam menyuatkan pembelaan terhadap dunia Islam, khususnya Palestina. Ini mencerminkan sikap konsisten bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,”

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

ta OKI dapat memelopori konsolidasi global demi menghadirkan dunia yang lebih adil, damai, dan merdeka, terutama

bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah seperti Palestina,” tutup Abdul Hadi.

Hadiri Sidang PUIC ke-19, Reni Astuti Tekankan Isu Perempuan dan Anak dalam Konflik Global

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI dan mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I, menghadiri pembukaan Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Reni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sidang PUIC di Indonesia serta perhatian serius yang diberikan terhadap isu-isu strategis, terutama yang menyangkut perempuan dan anak-anak di tengah konflik global.

"Hari ini saya hadir di dalam pembukaan sidang PUIC ke-19 di mana Parlemen Republik Indonesia menjadi tuan rumah terselenggaranya sidang-sidang PUIC. Tentu saya memberikan apresiasi terhadap isu-isu yang dibahas, utamanya adalah terkait dengan anak dan

perempuan," ujar Reni.

Ia juga menyoroti kehadiran dan peran aktif Parlemen Perempuan Muslim yang menjadi bagian penting dalam sidang PUIC kali ini. Menurutnya, forum tersebut memberikan tekanan kuat terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam mewujudkan perdamaian dunia dan penguatan pemberdayaan perempuan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Isu-isu terkait dengan perang, di mana anak dan perempuan menjadi korban,

tentu harus menjadi konsen kita bersama. Hasil dari sidang PUIC ini juga memberikan penekanan terhadap kepedulian dan keselamatan korban perang yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan," tegas Reni.

Reni Astuti berharap rangkaian sidang PUIC yang diselenggarakan di Jakarta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan perdamaian dunia, memperkuat solidaritas antarnegara Islam, serta membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia dan negara-negara anggota OKI.

"Semoga kegiatan sidang-sidang PUIC yang terselenggara di Parlemen Republik Indonesia akan memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian dunia, kemajuan Indonesia, dan juga negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam," pungkasnya.



"Isu-isu terkait dengan perang, di mana anak dan perempuan menjadi korban, tentu harus menjadi konsen kita bersama. Hasil dari sidang PUIC ini juga memberikan penekanan terhadap kepedulian dan keselamatan korban perang yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI



Apresiasi Pidato Presiden Prabowo dalam Pembukaan Sidang PUIC ke-19, Aleg PKS Yanuar Arif : Indonesia Tegaskan Komitmennya terhadap Palestina

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI,

menghadiri secara langsung pembukaan Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta. Sidang ini dihadiri oleh perwakilan parlemen dari negara-negara

“Pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden sarat dengan makna dan pesan-pesan kuat. Islam ditampilkan dalam wajah yang damai, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang tidak kalah penting adalah penegasan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,”

H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.

Anggota Komisi V DPR RI

anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka secara resmi rangkaian sidang dan menyampaikan pidato kenegaraan yang penuh pesan kuat dan bernas.

Menurut Yanuar, pidato Presiden mencerminkan wajah Islam yang damai dan meneguhkan peran Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden sarat dengan makna dan pesan-pesan kuat. Islam ditampilkan dalam wajah yang damai, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang tidak kalah penting adalah penegasan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” ujar Yanuar.

Ia menyoroti penderitaan

anak-anak, ibu-ibu, dan seluruh rakyat Palestina yang terus mengalami ketidakadilan dan penjajahan. Menurutnya, sudah saatnya negara-negara OKI mengambil sikap tegas dan meninggalkan ego sektoral untuk menyatukan kekuatan dalam membela Palestina.

“Mereka harus segera diberikan kemerdekaannya. Bukan lagi retorika, bukan lagi basa-basi, tapi aksi nyata. Semua negara OKI harus mengambil peran tegas dan meninggalkan ego sektoral dalam memperjuangkan Palestina,” tegas Yanuar.

PKS, lanjutnya, sejak awal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong diplomasi parlemen Indonesia agar lebih aktif dalam isu-isu kemanusiaan global, khususnya di kawasan Timur Tengah.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif

1 Juni 2025

Harlah Pancasila

*Memperkokoh Ideologi
Pancasila Menuju
Indonesia Raya*





Hadiri Sidang PUIC ke-19, Nasir Djamil: Good Governance, Strong Institution, dan Strong Leader adalah Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta (15/05) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berpihak kepada rakyat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI saat menghadiri Pembukaan Sidang PUIC ke-19 di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/05/2025).

Dalam pernyataannya, Nasir Djamil menyampaikan bahwa good governance merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah syarat utama agar sebuah negara dapat merealisasikan cita-citanya dan menyejahterakan rakyatnya,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks dan penuh tantangan, semua negara termasuk Indonesia dituntut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan mereka.

“Menghadapi globalisasi yang semakin komplikatif, good governance menjadi hal yang

tidak bisa ditawar. Setiap pemerintahan harus menjadikannya sebagai komitmen bersama,” tegasnya.

Nasir juga menambahkan bahwa good governance harus berjalan seiring dengan pembangunan institusi yang kuat (strong institution), yang pada dasarnya lahir dari kepemimpinan yang kuat dan visioner (strong leader). Ketiganya, menurutnya, adalah tiga kata kunci penting untuk menyongsong masa

depan Indonesia.

“Good governance, strong institution, dan strong leader adalah tiga kata kunci yang harus menjadi pegangan kita dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tambahnya

Sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Nasir Djamil juga menekankan pentingnya supremasi hukum dan penegakan etika dalam membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat.

Nasir berharap seluruh pemangku kebijakan dan elemen bangsa dapat bersinergi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan melayani kepentingan publik secara adil dan berkelanjutan.

“Good governance, strong institution, dan strong leader adalah tiga kata kunci yang harus menjadi pegangan kita dalam menghadapi tantangan global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,”

Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI



Saadiah Uluputty: PUIC Jadi Wadah Strategis Umat Islam Hadapi Tantangan Global dan Perjuangkan Palestina

Jakarta (15/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, yang juga merupakan Anggota Komisi IV DPR RI, menghadiri pembukaan The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam momen tersebut, Saadiah menyoroti pentingnya kehadiran forum PUIC sebagai wadah besar umat Islam dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

"Kita baru saja mengikuti konferensi dan rapat yang digelar bersama dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI. Satu hal penting yang disampaikan adalah bahwa dunia Islam membutuhkan wadah besar agar persoalan-persoalan global yang pelik ini bisa dipecahkan bersama, bisa ada solusi yang paripurna," ujar Saadiah.

Saadiah menambahkan bahwa isu-isu strategis yang menyangkut kemiskinan, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina

turut diangkat dalam forum ini. Menurutnya, inilah saatnya umat Islam bersatu dalam kekuatan politik yang solid untuk menyuarakan keadilan global.

"Persoalan kemiskinan, keadilan, dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina menjadi pembahasan penting. Kita berharap konferensi PUIC ke-19 yang digelar di Indonesia ini mampu

melahirkan rekomendasi dan solusi yang berarti," ungkap legislator asal Maluku itu.

Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, Saadiah menilai sidang PUIC adalah momentum strategis untuk merumuskan kebijakan-kebijakan bersama demi kemajuan umat Islam dan solidaritas internasional, khususnya terhadap negara-negara yang tengah mengalami krisis kemanusiaan.

"Dalam wadah besar ini, umat Islam berkumpul untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah kebijakan demi kemajuan dunia Islam. Kita berharap hasil konferensi ini akan membawa dampak nyata dan memperkuat peran kolektif dunia Islam dalam menghadapi berbagai tantangan," pungkasnya.

"Kita baru saja mengikuti konferensi dan rapat yang digelar bersama dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI. Satu hal penting yang disampaikan adalah bahwa dunia Islam membutuhkan wadah besar agar persoalan-persoalan global yang pelik ini bisa dipecahkan bersama, bisa ada solusi yang paripurna,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



image istimewa

Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di
Pembukaan Sidang PUIC ke-19,

Kurniasih Mufidayati : Saatnya Dunia Membuka Mata dan Hati untuk Palestina

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, turut hadir dalam pembukaan Silver Jubilee 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Kurniasih menyampaikan apresiasinya atas pidato Presiden PKS di parlemen, Kurniasih menekankan pentingnya dukungan terhadap nasib perempuan dan anak-anak Palestina yang sangat memprihatinkan akibat perajahan dan blokade.

"Alhamdulillah baru saja selesai pembukaan acara PUIC ke-19. Ini luar biasa. Kami

mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia yang secara khusus memberikan pembelaan terhadap Palestina," ujar Kurniasih.

Sebagai representasi perempuan PKS di parlemen, Kurniasih menekankan pentingnya dukungan terhadap nasib perempuan dan anak-anak Palestina yang hingga hari ini masih menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan akibat perajahan dan blokade.

"Dari Fraksi PKS, kami selalu mendukung penuh perjuangan untuk kemerdekaan Palestina, khususnya pembelaan terhadap perempuan dan anak-anak yang sampai hari ini tidak mendapatkan hak hidup yang layak. Beberapa hari terakhir bahkan banyak anak-anak meninggal karena kekurangan makanan dan air bersih," tambahnya.

"Mari kita bersama menyatukan langkah kita, menyatukan suara kita, dan membuka mata hati dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, khususnya perlindungan bagi perempuan dan anak Palestina. Merdeka Palestina, Free-free Palestine!"

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

la mengajak seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional untuk bersatu dalam langkah dan suara, serta mendesak dunia agar membuka mata hati demi kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

"Mari kita bersama menyatukan langkah kita, menyatukan suara kita, dan membuka mata hati dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, khususnya perlindungan bagi perempuan dan anak-anak Palestina. Merdeka Palestina, Free-free Palestine!" tegas Kurniasih.

Fraksi PKS di DPR RI secara konsisten menyorakan isu-isu kemanusiaan global, khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan penindasan, sebagai bentuk nyata dari diplomasi parlemen berbasis nurani dan keberpihakan terhadap korban.



image istimewa
INDONESIA

Aleg PKS Rahmat Saleh Dorong Kerja Sama Negara Islam Diperkuat untuk Dukung Palestina

Jakarta (15/05) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menghadiri pertemuan Organisasi Parlemen Negara-negara Islam (PUIC) di Ruang Paripurna DPR RI, Kamis (15/05).

Forum ini dihadiri 43 negara anggota OKI dan membahas penguatan pemerintahan negara Islam serta dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Rahmat menekankan pentingnya solidaritas antar negara Islam, terutama dalam memper-

kuat institusi pemerintahan masing-masing.

"Kalau institusi pemerintahannya tidak stabil, bagaimana bisa menyuarakan keadilan global, termasuk untuk Palestina?," ujarnya.

Menurut Rahmat, tantangan yang dihadapi dunia Islam bukan hanya ekonomi, tapi juga tekanan politik eksternal dan krisis kemanusiaan.

Karena itu, penguatan parlemen sebagai alat perjuangan bersama dianggap strategis.

la juga menyerukan agar isu Palestina tidak berhenti pada pernyataan politik semata.

"Sudah terlalu lama kita menyuarakan Palestina tanpa tindakan konkret. Kini saatnya negara-negara Islam bersatu menekan forum internasional agar hak-hak Palestina dipulihkan," katanya.

Dalam forum tersebut, beberapa negara mengusulkan pembentukan satuan kerja

parlemen untuk fokus pada isu Palestina.

Rahmat mendukung gagasan ini dan menyatakan Indonesia harus siap berperan aktif.

"Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam perjuangan ini," ujarnya.

Rahmat menegaskan, langkah konkret seperti kerja sama ekonomi, bantuan pendidikan, hingga dukungan infrastruktur untuk Palestina perlu diwujudkan.

Dia mendorong agar negara-negara Islam rutin bertukar kebijakan dan memperkuat diplomasi parlemen.

"Kekuatan dunia Islam terletak pada kesatuan visi dan keteguhan lembaga-lembaga strategisnya. Kalau kita solid, kita bukan hanya bisa memperkuat negeri sendiri, tapi juga menjadi benteng terakhir bagi keadilan dunia," pungkasnya.

H. RAHMAT SALEH, S.Farm., M.I.P

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I



image istimewa

Wakil Ketua FPKS Netty Prasetyani Apresiasi Sikap Tegas Presiden RI dan Ketua DPR RI dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina di Sidang PUIC ke-19

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetyani, yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI, menyampaikan rasa bahagia dan haru

saat menghadiri pembukaan The 19th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Ruang Paripurna DPR, MPR, dan DPD RI, Jakarta.

Dalam sidang yang dihadiri oleh para delegasi parlemen

“Pidato Ketua DPR RI luar biasa. Beliau menegaskan bahwa Gaza adalah milik Palestina, Gaza adalah milik umat Islam. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina,”

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut, Netty mengapresiasi sikap tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang secara lantang menyatakan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Sungguh malam ini malam yang membahagiakan. Presiden Republik Indonesia menyampaikan secara tegas bahwa Indonesia akan terus tegak lurus di atas amanat konstitusi untuk membela dan mengamandangkan kemerdekaan Palestina,” ungkap Netty.

Menurut Netty, pernyataan Presiden Prabowo yang menyerekkan persatuan negara-negara Islam untuk melawan penindasan dan genosida merupakan cerminan kepemimpinan yang berani dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selain itu, Netty juga memberikan apresiasi tinggi atas pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menegaskan

bahwa Gaza adalah milik Palestina dan milik umat Islam. Pidato tersebut, menurutnya, semakin memperkuat posisi parlemen Indonesia dalam diplomasi internasional terkait isu Palestina.

“Pidato Ketua DPR RI luar biasa. Beliau menegaskan bahwa Gaza adalah milik Palestina, Gaza adalah milik umat Islam. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

Netty juga menegaskan bahwa Fraksi PKS secara konsisten berada di garda terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong pemimpin bangsa agar menjalankan amanat konstitusi secara nyata.

“Kita dorong terus para pemimpin bangsa, baik Presiden maupun Ketua DPR RI, untuk menunaikan amanat konstitusi sampai Palestina benar-benar merdeka,” pungkas Netty.



Mahfudz Abdurrahman Tegaskan Dukungan PKS untuk Palestina dalam Pembukaan Sidang PUIC ke-19

Jakarta (15/05) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Abdurrahman, menghadiri Gala Dinner bersama delegasi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

dalam rangka pembukaan Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/05/2025).

Dalam suasana penuh kehangatan dan persaudaraan tersebut, Mahfudz menegaskan

bahwa silaturahmi yang terjalin antarparlemen negara-negara OKI tidak hanya mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga menjadi momen penting untuk menyatukan langkah dalam membela perjuangan rakyat Palestina.

"Baru selesai makan malam bersama para delegasi dari negara-negara OKI dalam suasana yang penuh kegembiraan dan silaturahmi. Namun, fokus utama kita tetap satu: bahwa OKI harus bisa berbuat lebih untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ujar Mahfudz.

Mahfudz juga menegaskan posisi tegas PKS yang sejak awal konsisten menyuarkan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan.

"PKS sangat memberi dukungan yang tinggi untuk ke-

"Baru selesai makan malam bersama para delegasi dari negara-negara OKI dalam suasana yang penuh kegembiraan dan silaturahmi. Namun, fokus utama kita tetap satu: bahwa OKI harus bisa berbuat lebih untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,"

**H. MAHFUDZ
ABDURRAHMAN, S.Sos**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

merdeka Palestina, dan kami selalu berjuang untuk itu dalam berbagai forum dan jalur diplomasi," tegasnya.

Menurut Mahfudz, dukungan tersebut tak hanya simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam dorongan kebijakan luar negeri yang pro-kemanusiaan dan advokasi internasional.

"Semoga Palestina, khususnya Gaza, dapat segera terbebas dan berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Allahu Akbar," pungkasnya penuh harap.

Partisipasi aktif DPR RI sebagai tuan rumah dalam sidang PUIC ke-19 menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam perjuangan global atas keadilan dan kemerdekaan, terutama bagi bangsa Palestina.

Apresiasi Pidato Presiden Prabowo dan Ketua DPR di PUIC ke-19,

Haji Jalal : Seruan Persatuan Umat dan Pemerintahan Bersih

Jakarta (15/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat VII, Haji Jalal Abdul Nasir, Ak., menyampaikan apresiasi mendalam terhadap pidato Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam forum Inaugural Session Of The 19th Session Of The Puic Conference yang digelar di Paripurna I Meeting Room, DPR RI.

Menurut Haji Jalal, pidato Prabowo sarat nilai historis dan spiritual yang menggugah kesadaran kolektif umat Islam untuk kembali pada akar kekuatan peradabannya.

“Presiden terpilih Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan yang sangat kuat dalam substansi, meneguhkan kembali pentingnya meneladani tokoh-tokoh besar Islam seperti Salahudin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, hingga Muhammad Al-Fatih. Ini bukan

sekadar nostalgia sejarah, tapi arah moral bagi umat Islam untuk bangkit dengan nilai, sains, dan kekuatan kepemimpinan yang bersih,” ujar Haji Jalal.

Haji Jalal juga menyoroti secara khusus pernyataan Prabowo tentang Palestina.

“Di forum parlemen negara-negara Islam (PUIC), Pak Prabowo menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan pernah berhenti membela hak rakyat Palestina. Ini sikap tegas yang selaras dengan amanah

konstitusi kita dan suara nurani rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Haji Jalal memberikan penghargaan atas pidato pembukaan dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang turut menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan lembaga negara yang kokoh.

“Puan Maharani dengan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan parlemen dan membangun sinergi antarnegara Muslim menunjukkan arah diplomasi yang moderat, progresif, dan berbawa,” lanjutnya.

Haji Jalal menilai bahwa Sidang PUIC ke-19 ini menjadi momentum strategis untuk mempererat solidaritas antarpemerintah negara-negara Islam, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menguatkan peran pemuda, dan mempercepat pembangunan ekonomi umat berbasis keadilan sosial.

“Dari forum ini kita mendapatkan sinyal penting: peradaban Islam bisa bangkit kembali jika dipimpin oleh pemimpin yang bersih, berpihak pada umat, dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta kemanusiaan. Itulah esensi dari pidato Prabowo dan Puan Maharani yang patut kita dukung bersama,” pungkask Haji Jalal.



“Presiden terpilih Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan yang sangat kuat dalam substansi, meneguhkan kembali pentingnya meneladani tokoh-tokoh besar Islam seperti Salahudin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, hingga Muhammad Al-Fatih. Ini bukan sekadar nostalgia sejarah, tapi arah moral bagi umat Islam untuk bangkit dengan nilai, sains, dan kekuatan kepemimpinan yang bersih,”

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI



Tak Sekedar Pernyataan, HNW Harap Uni Eropa Lebih Berani Tekan Israel, Buka Blokade Gaza

Jakarta (11/05) — Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mendukung pernyataan yang disampaikan pemimpin Uni Eropa agar Israel segera membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang telah berlangsung selama dua bulan.

Tapi HNW mengkritisi karena mestinya Uni Eropa dapat menekan Israel agar sejarah kelam 'holocaust' yang dahulu terjadi atas bangsa Yahudi di kawasan Eropa, tidak terulang kembali dengan dipraktekkannya holocaust oleh Israel yang yahudi itu terhadap bangsa Palestina di Gaza.

"Sebagai bukti keseriusan

pernyataan Uni Eropa, seharusnya Uni Eropa secara langsung melakukan langkah-langkah politik, ekonomi, sosial dan militer untuk menekan Israel, agar membuka blokade bantuan ke Gaza, agar tragedi kemanusiaan seperti holocaust yang dahulu terjadi atas bangsa Yahudi di kawasan Eropa tidak terulang kembali dan menimpa warga Gaza di Palestina," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu(10/05/2025).

HNW sapaan akrabnya tragedi kemanusiaan holocaust yang diklaim menyebabkan terbunuhnya sekitar 6 juta warga Yahudi di kawasan Eropa merupakan pengalaman buruk yang dijadikan dalih legalisasi adanya negara Israel, mestinya tidak boleh terulang kembali apalagi dilakukan sendiri oleh bangsa Yahudi di negara Israel, terhadap siapa pun, apalagi terhadap kepada bangsa Palestina, yang dahulu sangat ramah dan baik hati menerima para diaspora Yahudi korban holocaust Nazi, dengan kini diberlakukan blokade kemanusiaan total atas Gaza, yang menghadirkan tragedi genosida dengan kelaparan massal di Jalur Gaza akibat blokade bantuan kemanusiaan dan serangan Israel yang terus berlangsung.

"Ini terutama harus menjadi tanggung jawab negara-negara Uni Eropa untuk menghentikannya. Bukan hanya urusan negara-negara Arab

(Timur Tengah), atau negara-negara muslim saja.

arena kalau dilihat dari sejarah terbentuknya negara Israel yang menjajah bangsa Palestina, negara-negara di kawasan Eropa yang tergabung ke dalam Uni Eropa seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih. Pasalnya, para warga Israel yang menduduki tanah dan menjajah Palestina berasal dari kawasan Eropa tersebut," jelasnya.

"Seharusnya ada tanggung jawab yang lebih dan dibebankan kepada negara-negara Eropa tersebut, karena persoalan penjajahan Israel terhadap Palestina dimulai dari sana," tukasnya.

HNW mengatakan Uni Eropa yang mempunyai kekuatan politik, militer dan ekonomi, seharusnya bisa lebih berani dari masyarakat Eropa penolak kejahatan kemanusiaan Israel atas Gaza di Eropa. Misalnya, seperti Federasi Serikat Buruh Norwegia dengan jutaan anggotanya yang berani mengeluarkan keputusan untuk memboikot segala bentuk barang dan investasi yang berkaitan dengan Israel. Juga 30-an aktivis yang kembali mencoba menerobos blokade Israel atas Gaza dengan perahu kemanusiaannya, sekalipun ditenggelamkan oleh Israel.

"Apalagi saat ini juga dikabarkan bahwa pemerin-

Tak Sekedar Pernyataan, HNW Harap Uni Eropa Lebih Berani Tekan Israel, Buka Blokade Gaza

« SEBELUMNYA

tahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan sekutu terdekat dengan Israel sudah merenggang hubungannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini semakin menunjukkan bahwa membabi buta mendukung Israel lebih banyak menghadirkan mudharat bagi kepentingan nasionalnya,” tukasnya.

Oleh karena itu, HNW berharap agar Uni Eropa juga bisa ikut bertindak lebih konkret untuk menghentikan genosida dan memastikan bantuan ke-

manusiaan bisa sampai ke penduduk Gaza, Palestina, bukan hanya sekedar menyampaikan pernyataan.

“Apabila para aktivis di Eropa juga pernah berani mencoba menerobos beberapa tahun lalu dalam program kapal Freedom Flotilla, lalu dihentikan atau ditenggelamkan Israel, maka tentu Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bisa bertindak lebih dari itu,” tukasnya.

“Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang menjadi anggota ICC dan ICJ (yang keduanya bermarkas di Belanda/ Eropa) dan menyetujui Resolusi

PBB terkait illegalitas pendudukan Israel, mestinya melaksanakan keputusan-keputusan itu, dan tidak malah melakukan tindakan represif terhadap demo-demo damai membela Gaza dan yang mengkritisi laku genosida/holocaust Israel terhadap Gaza seperti tindakan represif yang terjadi di Jerman, Belanda, Perancis dan Inggris,” ujarnya.

“Dan mestinya negara-negara Uni Eropa kemudian bisa bertindak langsung dengan mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bila itu mereka lakukan kecil kemungkinan Israel berani menghalangi apalagi menenggelamkan kapal bantuan dari Uni Eropa. Mengingat mereka memiliki hubungan baik diplomatik dan dagang satu sama lain. Dan bahkan mungkin sikap serius Uni Eropa akan lebih didengarkan oleh Israel. Apalagi kalau Uni Eropa termasuk Jerman, mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi dan negara Israel nya yang dulu hadir dengan klaim sebagai korban holocaust, seharusnya tidak melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi seperti yang dilakukan sekarang oleh Israel atas Gaza dengan melakukan holocaust, genosida dan sekaligus apartheid terhadap Gaza/Palestina. Dan kalau itu semua dilakukan Uni Eropa, maka mereka akan membuat sejarah, menyelamatkan kemanusiaan dan peradaban,” tutup HNW.



“Apabila para aktivis di Eropa juga berani mencoba menerobos beberapa tahun lalu dalam program kapal Freedom Flotilla, lalu dihentikan atau ditenggelamkan Israel, maka tentu Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bisa bertindak lebih dari itu,”

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI



*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf

Suami dari Jurnalis Najwa Shihab

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin





Habib Aboe Bakar Alhabsyi
DPP PKS

Sekjend PKS Sampaikan Duka Mendalam atas Insiden Ledakan di Garut, Desak Audit Pemusnahan Amunisi TNI

Jakarta (12/05) --- Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya pribadi dan atas nama keluarga besar PKS menyampaikan duka mendalam kepada keluarga para korban. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan" ujar Habib Aboe Bakar dalam keterangannya kepada media, Senin (12/05).

Menurut Habib Aboe Bakar, peristiwa seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila ada prosedur tetap (SOP) yang ketat dan dijalankan dengan disiplin. Ia menyoroti pentingnya keselamatan dalam setiap kegiatan yang melibatkan bahan peledak atau amunisi aktif.

"Pemusnahan amunisi, apalagi yang tidak layak atau sudah kedaluwarsa, adalah kegiatan dengan risiko tinggi. Maka sudah seharusnya dilakukan dengan standar operasional yang ketat, profesional, dan diawasi oleh unit yang berkompeten," tegasnya.

Habib Aboe Bakar juga

mendesak agar Markas Besar (Mabes) TNI segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi mencegah kejadian serupa di masa depan.

"Saya mendorong Mabes TNI untuk segera melakukan audit menyeluruh atas insiden ini, termasuk mengevaluasi SOP yang digunakan serta mengidentifikasi jika ada kelalaian atau pelanggaran prosedur. Ini

bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi negara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Habib Aboe Bakar juga meminta agar korban dan keluarga yang terdampak diberikan perhatian dan perlindungan yang layak dari negara.

"Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Negara harus hadir, memberikan santunan, pendampingan, dan dukungan psikologis kepada para keluarga korban," pungkasnya.

PKS mengajak seluruh pihak untuk menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam hal manajemen risiko kegiatan militer di wilayah sipil, serta memperkuat budaya keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

"Saya mendorong Mabes TNI untuk segera melakukan audit menyeluruh atas insiden ini, termasuk mengevaluasi SOP yang digunakan serta mengidentifikasi jika ada kelalaian atau pelanggaran prosedur. Ini bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi negara,"

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***